

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT (LKMM)
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

YANTO
NIM. 083 112 022

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN HUKUM EKONOMI
2015**

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT (LKMM)
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Syariah (S.Sy) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Prodi Muamalah

Oleh :

YANTO
NIM. 083 112 022

Disetujui Pembimbing

Retna Anggitaningsih, SE.,MM
NIP. 19740420 199803 2 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN HUKUM EKONOMI
2015**

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT (LKMM)
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002

Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota :

1. **Moch. Chotib, MM** ()
2. **Retna Anggitaningsih, SE.,MM** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M. HL.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat beratsiksa-Nya (QS. Al-Maidah, 5:2).

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah banyak berjasa dalam kesuksesan belajar yang telah saya lalui selama ini, mereka adalah:

1. Ayahanda Jumla'i tersayang dan Ibunda Masriya tercinta pemberi kasih abadi yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi serta selalu mendukungku di setiap langkahku.
2. Keluarga Besar, paman serta bibiku yang selalu memberiku kasih sayang selayaknya ayah dan ibu kandungku, kakak, serta keponakan-keponakanku, yang selalu mendukung proses kuliah selama ini dan memotivasiku.
3. Rofiatul Munawaroh yang senantiasa menemani, membantu, dan memotivasiku selama ini.
4. Sahabat-sahabatku yang seiring, sejalan dan seperjuangan kelas C, Muamalah..
5. Almamaterku IAIN Jember dan Civitas Akademika, terima kasih telah menaungi saya selama saya menempuh studi.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. *Sholatullah wa salamuhu* semoga terus tercurah kepada Rasulullah SAW, Keluarganya, para Sahabatnya, dan Orang-orang yang berpegang teguh pada risalahnya. Yang membawa umat manusia pada kehidupan yang bermakna, dari terjalnya lorong kehidupan.

Pada dasarnya skripsi ini merupakan sebuah karya yang membutuhkan waktu, tenaga serta pikiran yang tidak sedikit untuk dapat menyelesaikannya. Namun kami sadar akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga karya ini membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya pihak-pihak lain yang membantu. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak DR. H. Sutrisno. RS.M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Mahmudah S.Ag.M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi.

4. Ibu RetnaAnggitaningsih, SE.MM. selaku dosen pembimbing yang telah susah payah membimbing dan memberikan waktunya pada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan.
6. Bapak Ir. Mirfano selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupten Jember yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak Djamil selaku Kepala Bidang dan juga staff Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember atas kesediaannya memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan selama penulisan skripsi ini.
8. Tunanganku Rofiatul Munawaroh, yang selalu ada di sampingku, menemani dan memotivasiku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh sahabat/ sahabati seperjuangan kelas C Muamalah, dan teman-teman kontrakan yang telah memberikan bantuan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah kami berlindung, memohon Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, *Amin Ya Rabbal Alamin.....*

Jember, 19 Oktober 2015

YANTO
NIM. 083 112 022

ABSTRAK

Yanto, 2015 : *Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember*

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai tugas desentralisasi di bidang Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM), untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai tugas antara lain: Membantu Permodalan, Pengawasan, Motivasi, dan Pengarahan kepada Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat.

Adapun focus masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Dinas Koperasi UMKM dalam Permodalan, Pengawasan, Motivasi, dan Pengarahan terhadap LKMM?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa peran Dinas Koperasi UMKM baik perannya dalam permodalan, pengawasan, motivasi maupun pengarahan.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Peran Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember dalam aspek permodalan LKMM adalah hanya sebagai penyalur modal dana hibah dari Pemda Jember kepada LKMM dan selanjutnya disalurkan ke kelompok masyarakat sebagai modal usaha. Masyarakat menganggap bahwa dana hibah tersebut tidak harus dikembalikan. Dalam Islam pun hibah tidaklah wajib dikembalikan namun pihak LKMM menggunakan dana tersebut dengan sistem simpan pinjam dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Jember. Dalam hal ini LKMM tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dana hibah dirubah fungsinya menjadi sistem simpan pinjam.

Peran Dinas Koperasi UMKM dalam aspek pengawasan LKMM sangat urgen. Sebab Dinas Koperasi UMKM semua proses keluar masuknya uang akan diketahui dengan cara mengevaluasi setiap laporan keuangan LKMM.

Dalam aspek peran motivasinya juga tidak kalah penting. Dinas Koperasi UMKM memberikan penyadaran akan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Teori Abraham Maslow adalah salah satu teori motivasi yang digunakan Dinas Koperasi UMKM dalam perannya sebagai pemberi motivasi LKMM.

Sedangkan perannya dalam aspek pengarahan pun juga bagus, Pelaksanaan agenda-agenda yang bersifat pengarahan seperti Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan LKMM, hingga program Kemitraan Usaha sudah cukup untuk mengembangkan LKMM di kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap- Tahap Penelitian	42

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran - Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Keaslian Tulisan	
B. Matrik Penelitian	
C. Foto	
D. Jurnal Penelitian	
E. Surat Keterangan ijin Penelitian	
F. Surat Keterangan Selesai	
G. Pedoman Wawancara	
H. Daftar nama Informan	
I. Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM	
J. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Banyaknya LKMM Menurut Tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/ Kelurahan, serta Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2014.....	59
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kuadran hasil analisa SWOT LKMM yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember Tahun 2015.....	67
-----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.¹

Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Pada tahun 2014, sejumlah 28,28 juta jiwa atau sekitar 11,25% penduduk Indonesia masih dikategorikan miskin, meskipun dibanding tahun 2010 angka itu telah menurun yaitu berjumlah 31,023 juta jiwa atau sekitar 13,33%.²

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 51.

²Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014.

keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasannya.³

Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya atau kelompok masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.⁴

Lembaga keuangan mikro Masyarakat adalah embrio dari koperasi, Lembaga keuangan mikro masyarakat (LKMM) merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pengentasan kemiskinan ditingkat dusun atau desa dan lembaga keuangan mikro masyarakat tersebut adalah milik masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember didirikan pada Bulan September 2005 yang bermula dengan 2 Lembaga keuangan Mikro Masyarakat yakni yang ada di dua Dusun di Desa Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember hingga tahun 2015.

Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) yang sudah berdiri

³Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 23

⁴ *Dasar-dasar dan Contoh AD-ART BMT* (Jakarta: PINBUK, 2000), 1.

dikabupaten jember yakni 513 Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) yang tersebar di dusun dusun Kabupaten Jember.⁵

Semakin meningkatnya pendirian Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember maka dibutuhkan peran serta pemerintah khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Jember untuk menumbuh kembangkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) sehingga kedepannya menjadi Lembaga keuangan Mikro yang produktif dan mempunyai daya saing.⁶

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai tugas desentralisasi di bidang Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM), kemudian untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Jember khususnya pada bidang Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) mempunyai tugas antara lain: Membantu Permodalan Lembaga Keuangan, pengawasan, memberi motivasi, dan memberi pengarahan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember**

⁵ Agus Edhi Susanto, *wawancara*, Kasi Usaha Mikro Dinas Koperasi UMKM Jember, 15 April 2015

⁶ B. Miles, dan Huberman. 1988. *Qualitatif Data Analisis*. California: Sage Publication. 134

⁷ Moh Jamil, *wawancara*, Kepala Bidang UMKM Kabupaten Jember, 23-06-2015

B. FOKUS KAJIAN

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁸

1. Fokus penelitian

Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember?

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam membantu permodalan untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengawasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember?
- c. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memotivasi Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember?

⁸ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 44-45.

- d. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengarahkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam membantu permodalan untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember
- b. Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengawasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember
- c. Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memotivasi Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember

⁹Ibid., 45.

- d. Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengarahkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.¹⁰

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM).

2. Bagi Instansi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Jember sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi para pelaku Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM).

3. Bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan referensi Perpustakaan

¹⁰Ibid., 45.

dan sebagai tambahan wawasan yang berguna bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang membutuhkan.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹

1. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

2. Dinas Koperasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan jawatan atau pemerintah.¹² Sedangkan Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi, dan berjalan dengan prinsip gotong royong. Jadi dapat diambil

¹¹Ibid., 45.

¹²Meaty Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011),98

kesimpulan bahwasanya dinas koperasi adalah bagian dari badan pemerintahan yang bergerak dalam bidang perkoperasian, dinas koperasi dapat menjadi tonggak atau pedoman bagi anggota- anggota koperasi lainnya.

3. UMKM

UMKM yaitu Usaha Mikro Kecil Masyarakat atau biasa disebut dengan UKM mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.¹³

4. Pengembangan

Kata "pengembangan" yang dikemukakan oleh J. S. Badudu sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai hal, cara, atau hasil mengembangkan sedangkan mengembangkan sendiri berarti membuka, memajukan, menjadi maju, dan bertambah baik.

Pengembangan diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, koseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau pelatihan.¹⁴

5. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat

Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga ekonomi rakyat, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Usaha-Kecil-Dan-Menengah/> (20/10/2015)

¹⁴ <http://www.Developmentcountry.blogspot.com/2009/12/definisi-pengembangan.html?m=1> (09/03/2015)

meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip prinsip koperasi.¹⁵

Adapun maksud dari judul penelitian ini yaitu peneliti ingin membahas dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai peran dinas koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat yang ada di Kabupaten Jember.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang bagian-bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis dan utuh.

BAB I: merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Memfaat Penelitian, Definisi Istilah.

BAB II: Merupakan Bab Kajian Kepustakaan, yang terdiri dari 1. Penelitian terdahulu, 2.Kajian teori, dalam kajian teori ini membahas tentang kajian teoritis tentang peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM).

BAB III. Merupakan bab yang membahas tentang Metode Penelitan, diantranya: 1. pendekatan dan jenis penelitian, 2. lokasi penelitian, 3. Subyek Penelitian, 4. Tehnik Pengumpulan Data, 5. tehnik Analisis data dan 6. Keabsahan data, 7.Tahap penelitian, dan 8. Sitematika pembahasan

¹⁵*Dasar dan Contoh AD-ART BMT* (Jakarta: PINBUK, 2000), 1

BAB IV. Dalam Bab ini berisi tentang Penyajian Data dan Analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian dan penyajian data serta temuan-temuan dalam penelitian.

BAB V. dalam Bab ini nantinya akan membahas tentang kesimpulan dan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Telah menjadi sebuah aksioma di dunia akademisi, bahwa tidak ada satupun bentuk karya tulis yang terputus dari usaha intelektual generasi sebelumnya. Maksudnya, tidak ada sebuah penelitian yang benar-benar baru dan orsinil yang tanpa terikat dengan penelitian generasi sebelumnya, yang ada adalah *contuinity and change* (kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan). Penelitian ini pada nantinya juga merupakan mata rantai intelektualisme Islam dari penelitian - penelitian sebelumnya, khususnya dalam kajian penelitian tentang perekonomian.

Sejauh pengetahuan penulis, terdapat karya ilmiah yang membicarakan tentang dinas koperasi dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro yakni:

1. Penelitian Dian Andhiny Paramasari tahun 2009 dengan judul “*Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian tersebut adalah Bagaimanakah strategi pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian tersebut membahas mengenai strategi Dinas Koperasi Kota Surakarta dalam pengembangan UMKM di kota tersebut baik dari aspek strategi penguatan, strategi pemberdayaan dan strategi perlindungan.

Adapun persamaan penelitiannya sahabat Dian Andhiny Paramasari dengan penelitian saya yakni terletak pada subyek penelitian yakni Dinas Koperasi. dan perbedaannya, yaitu penelitian Dian andhiny hanya terfokus ke Strategi Dinas Koperasi dalam Usaha mengembangkan UMKM sedangkan penelitian yang saya lakukan akan terfokus terhadap Peran Dinas Koperasi dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) dari segala aspek yang terdapat didalamnya.

2. Penelitian Hendratno Eko Putra tahun 2012 dengan judul *“Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembinaan Sentra Usaha Kecil Produksi Tempe di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Pemerintah Kota Surabaya”*.

Dalam skripsinya, Hendratno ini membahas Peranan Dinas Koperasi terhadap satu objek Usaha Mikro Kecil yakni Produksi Tempe di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun persamaan antara Skripsi yang ditulis oleh sahabat Hendratno ini dengan skripsi yang akan saya teliti yakni terletak pada Peran Dinas Koperasi itu tersendiri, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian, jika penelitian sahabat Hendratno ini hanya terfokus kepada satu Usaha Mikro yakni Produksi Tempe di

Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Pemerintah Kota Surabaya sedangkan penelitian yang saya lakukan akan terfokus pada Peran dinas Kopersi Usaha Mikro Kecil dan menengah terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat, jadi cakupannya lebih makro dari pada penelitian yang dilakukan oleh sahabat Hendratno Eko Putra Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

B. Kajian Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Paket Kebijakan dalam buku Totok Budisantoso menyatakan bahwa “Kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp250 juta untuk membiayai usaha produktif”. Sedangkan pengertian kredit untuk usaha mikro adalah “Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp25 juta”.

Sementara menurut Microcredit Summit dalam Ashari mengemukakan definisi kredit mikro yaitu “*Programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*” atau “Program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan

pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya”.

Meskipun terdapat perbedaan, tapi kedua pernyataan di atas mempunyai persamaan bahwa kredit mikro diberikan bagi pengusaha kecil dan mikro dengan plafon kredit yang berbeda untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. Usaha dikatakan produktif apabila usaha tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa serta pendapatan mereka. Kredit mikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan yang umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Mandala Manurung dan Prathama Rahardja menyatakan bahwa “LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”. Sementara itu menurut ahli lain, “LKM didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan”.

Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), dalam Ashari dinyatakan bahwa “LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut”. Walaupun terdapat banyak definisi LKM, terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu:

- a. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan

keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

- b. Melayani rakyat miskin Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.
- c. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

2. Peran Dinas Koperasi

Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa dalam penjelasan UUD 1945 telah mencantumkan secara jelas bahwa koperasi merupakan bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam UU No. 25 tahun 1992 bahwa koperasi diharapkan berperan:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Harapan yang lebih spesifik dikemukakan oleh bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, bahwa koperasi Indonesia mempunyai tugas:

- a. Memperbanyak produksi.
- b. Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat.
- c. Memperbaiki distribusi, pembagian kepada rakyat.
- d. Memperbaiki harga, yang menguntungkan bagi masyarakat.
- e. Menghilangkan penghisapan lintah darat.
- f. Memperkuat pemaduan capital.
- g. Memelihara lumbung simpanan padi.
- h. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya suatu tatanan social yang adil dan beradab.
- i. Mendorong terwujudnya suatu tatanan social yang manusiawi, yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Beberapa harapan yang dikemukakan diatas sebenarnya telah dipaparkan pula oleh lembaga-lembaga nasional maupun yang bersifat internasional. Internasional Labour Organization & International Labour Office dalam rekomendasi 17 yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1996 menjelaskan bahwa koperasi didirikan dan dikembangkan sebagai sarana:

- a. Untuk memperbaiki situasi ekonomi, social, dan budaya.
- b. Untuk Meningkatkan sumber dana pribadi dan nasional
- c. Untuk Memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan pengawasan secara demokratis
- d. Untuk Meningkatkan pendapatan, penerimaan ekspor dan penciptaan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya secara penuh
- e. Untuk Memperbaiki kondisi social dan pelayaann social
- f. Membantu meningkatkan pengetahuan umum dan keterampilan teknik para anggotanya.¹⁶

Adapun peran dinas koperasi untuk mengembangkan LKMM, maka Dinas Koperasi harus melakukan hal- hal mengenai permodalan, pengawasan, motivasi, dan pengarahan kepada LKMM, agar LKMM dapat mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip- prinsip koperasi

a. Permodalan

1) Pengertian Modal

¹⁶ Fathorrozi, *Ekonomi Koperasi*, (Jember: Jember University Press, 2010), 72-73

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.

Menurut Bambang Riyanto pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

Modal koperasi menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 dapat diperoleh dari:

- a) Anggota
- b) Bukan anggota

- c) Pemerintah
- d) Bank Umum Koperasi Pemerintah Indonesia (BUKOPIN) dan bank-bank lain.
- e) Sisa hasil usaha

Modal yang berasal dari anggota dapat berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela

- a) Simpanan pokok adalah simpanan yang ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota, yang dibayar pada waktu mendaftar menjadi anggota dan pembayaran secara tunai atau dapat juga diangsur. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali;I selama menjadi anggota koperasi.
- b) Simpanan wajib adalah simpanan yang dapat disetorkan setiap minggu, bulan atau menurut waktu yang ditetapkan oleh anggota dalam rapat anggota. Simpanan ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi.
- c) Simpanan sukarela adalah simpanan yang diberikan oleh anggota kepada koperasi, misalnya, dalam bentuk deposito. Simpanan ini dapat diambil kembali menurut perjanjian¹⁷

¹⁷ Ibid

2) Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992, modal koperasi dapat diambil dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Simpanan cadangan
- d. Hibah

Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari :

- a) Anggota
- b) Koperasi lainnya dan atau anggotanya
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

e) Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.¹⁸

b. Pengawasan

1) Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.

Definisi pengawasan menurut Robert J. Mockler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi,

¹⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 80-82

umpan balik, membandingkan kegiatannya dengan standaryang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambiltindakan koreksi yang di perlukan untuk menjamin bahwa sumberdaya perusahaan digunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan¹⁹

2) Macam-macam Pengawasan

Ada tiga macam-macam pengawasan

a) Pengawasan pendahuluan

Pengawasan pendahuluan atau sering di sebut *steering controls* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan kegiatan tertentu di selesaikan, jadi pendekatan pengawasan ini lebih efektif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang di perlukan sebelum suatu masalah terjadi.²⁰

b) Pengawasan *concurrent*

Pengawasan ini sering di sebut pengawasan yang tidak dilakukan selama kegiatan itu berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu produser harus di setujui dulu atau syarat tertentu yang harus di penuhi terlebih dahulu sebelum sesuatu itu di laksanakan atau di

¹⁹ Robert J Mockler, *Reading in Mengement control* , (New York, Apleton-Century-croft,1970),14

²⁰ Ricard L. Daft, *Menejemen*, (Jakarta: Salemba Empa, 2003),526

lanjutkan atau menjadi semacam peralatan *double-check* yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

c) Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan -kegiatan serupa dari masa yang akan datang, pengawasan ini bersifat *histories*, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

3) Tahap-Tahap Pengawasan

Proses pengawasan terdiri dari lima tahap proses pengawasan sebagai berikut:

a) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan yang artinya sebagai sesuatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar yang lebih khusus seperti, target penjualan, anggaran, bagian besar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.

b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penetapan standar sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat digunakan beberapa kali, pelaksanaan dapat diukur dalam setiap jam, harian dan mingguan serata bulanan, pengukuran ini dapat digunakan dalam bentuk raport yang di sediakan oleh pekerja yang bertugas itu yang akan dilaporkan kepada atasannya serta dapat dibaca oleh staf lainnya.

c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Setelah proses di atas digunakan maka tahap berikutnya adalah penjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:

- i. Pengamatan
- ii. Laporan-laporan lisan maupun tulisan
- iii. Metode-metode otomatis
- iv. Inspeksi pengujian atau dengan pengambilan sampel.

d) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpanan.

Tahap kritis dari proses penyimpangan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang di

rencanakan.pengadaan sistem yang setandar ini di perlukan sebagai tolak ukur suatu proses pekerjaan, dan penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya suatu proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki dimasa akan datang sehingga kesalahan yang di buat tidak akan terulang kembali, dan juga dapat menghindari kerugian yang besar dalam hal dana.

e) Pengambilan tindakan koreksi apabila di perlukan.

Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera diambil.Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa bentuk standar yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki.

Koreksi yang diperlukan dapat berupa:

- i. Mengubah standar mula, ada kemungkinan standar yang dimuat terlalu tinggi.
- ii. Mengubah pengukuran pelaksanaan

Mengubah dalam cara menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan - penyimpangan.²¹

²¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha ilmu,2006).134-136

4) Tujuan Pengawasan

- a) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b) Untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan dengan intruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
- c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan atau kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam bekerja.
- d) Untuk mengetahui apakah pekerjaan berjalan efisien.²²

c. Motivasi

1) Pengertian Motivasi

Menurut Robbins, S. (2001), motivasi adalah proses yang memperhitungkan *intensity* (intensitas), *direction* (arahan), dan *persitence* (kegigihan) dalam upaya meraih tujuan. pengertian tersebut mengandung 3 elemen utama, yaitu:

- a) *Intensity*, yaitu seberapa besar seseorang berusaha
- b) *Direction*, yaitu terkait dengan penyaluran upaya
- c) *Persistence*, yaitu seberapa lama seseorang akan bertahan dalam upaya yang akan di lakukan.

Menurut Stoner J.A., R.E. Freeman dan D.R. Gilbert Jr. (1995) Mendefinisikan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi, menyalurkan, dan memelihara perilaku individu.

²²<http://www.oaththinking.blogspot.com/2011/02/tujuan-pengawasan.html?m=1> (09/03/2015)

Scher merhorn, J.R. (1996) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kekuatan dari dalam individu yang memengaruhi tingkatan, arahan dan persistensi dalam menunjukkan upaya dalam pekerjaan.²³

2) Teori-teori Motivasi

Teori mulai di kenal pada tahun 1950-an. Secara khusus, pada awalnya ada tiga teori motivasi antara lain:

a) Teori Hirarki Kebutuhan

Teori ini pertama di kemokakan oleh Abraham Maslow, mungkin bisa dikatakan teori inilah yang paling populer bila di banding dengan teori lainnya. teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan (*need*) yang munculnya sangat tergantung pada kepentingannya secara individu. Maslow membagi kebutuhan manusia tersebut menjadi 5 tingkatan sehingga teori motivasi disebut sebagai ‘‘*the five hierarchy need*’’ mulai dari kebutuhan yang pertama sampai kebutuhan yang tertinggi. diantaranya.

1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi untuk hidup. kebutuhan fisiologis disebut sebagai kebutuhan pertama, antara lain

²³Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 148.

kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, seks, dan istirahat.

2) **Kebutuhan Rasa Aman.**

Kebutuhan rasa aman adalah merupakan kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik contoh . dalam sebuah perusahaan, dimasalkan adanya rasa aman tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaannya, misalnya danya asuransi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun.

3) **Kebutuhan Sosial.**

Setiap manusia ingin hidup berkelompok. kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima dengan baik dan persahabatan

4) **Kebutuhan Harga Diri.**

Kebutuhan harga diri menyangkut faktor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi dan prestasi. faktor penghormatan diri dari luar misalnya status, pengakuan, dan perhatian.

5) **Kebutuhan Aktualisasi Diri.**

Kebutuhan ini merupakan dorongan agar menjadi seseorang yang sesuai dengan ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri.

b) Teori Dua Faktor

Teori dua faktor pertama kali dikemukakan oleh Frederick Herzberg. dalam teori ini dikemukakan bahwa, pada umumnya para karyawan baru cenderung untuk memusatkan perhatiannya pada pemuasan kebutuhan lebih rendah dalam pekerjaan pertama mereka, terutama keamanan. setelah itu mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan inisiatif, kreatifitas, dan tanggung jawab. berdasarkan hasil penelitiannya, herzberg membagi dua faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi, antara lain faktor kepuasan dan ketidakpuasan.

Faktor kepuasan (satisfaction), biasa juga disebut sebagai motivator factor atau pemuas (satisfiers). termasuk pada faktor ini ialah faktor-faktor pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, antara lain, prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan.

Faktor ketidakpuasan (dissatisfaction), biasa juga hyginie factor atau faktor pemeliharaan merupakan faktor yang bersumber dari ketidakpuasan kerja. faktor faktor tersebut, antara lain kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, penggajian hubungan antar pekerja, kondisi kerja, keamanan kerja dan status pekerjaan.

c) Teori X dan Y.

Teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Menurut teori X, ada 4 asumsi yang dipegang manajer adalah sebagai berikut.

- i. karyawan secara inheren tidak menyukai kerja, dan bilamana dimungkinkan, akan mencoba menghindarinya.
- ii. karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan.
- iii. karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila dimungkinkan.
- iv. kebanyakan karyawan menaruh keamanannya di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan menunjukkan sedikit saja ambisi.

Berbeda dengan pandangan negatif mengenai sifat manusia, McGregor menjadi empat pandangan positif, yang disebut Teori Y:

- i. karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan alami yang sama dengan istirahat atau bermain.
- ii. Orang-orang akan melakukan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran.
- iii. Rata-rata orang dapat belajar untuk menerima, bahkan mengusahakan, tanggung jawab. Kemampuan untuk

mengambil ke putusan inovatif menyebarluas kesemua orang dan tidak hanya memiliki mereka yang berada berada dalam posisi manejemen.²⁴

3) Jenis-jenis Motivasi

Motivasi dapat di bedakan menjadi beberapa kelompok:

- a) Motivasi positif, adalah merupakan dorongan terhadap karyawan yang dapat berupa misalnya, hadiah, pujian. insentif, piagam dan lainnya yang sejenis.
- b) Motivasi negatif, adalah dorongan terhadap karyawan atau bawahan yang biasanya berupa ancaman, hukuman ataupun sangsi-sangsi.

4) Alat Motivasi

Motivasi yang di berikan kepada bawahan atau pegawai dapat berupa:

a) *Material*

Material merupakan alat motivasi yang bersifat material sebagai imbalan presentasi yang di berikannya, dan hal ini dapat di berikan berupa upah, gaji, barang-barang dan lainnya.

b) *Nonmaterial*

Nonmaterial merupakan motivasi yang tidak berbentuk materi. Yang termasuk non material ialah promosi, di berikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pujian setifikat, piagam dan lainnya.

²⁴ Wilson Bangun, *Intisari Manajemen* (Bandung: PT Refika Aditama. 2008), 119-123.

5) Dasar-Dasar motivasi

a) Mengikut sertakan bawahan orang lain

Untuk mendapatkan hasil yang baik, jika bawahan atau arong lain diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan keputusan-keputusan. Sehingga para bawahan dapat mengemukakan ide, saran, dan mereka akan merasa dirinya di manusiakan, sehingga ia akan bertanggung jawab atas tercapainya hasil yang maksimal.

b) Komunikasi

Dalam proses pencapaian hasil di antara para anggota dalam organisasi akan lebih baik mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut. tanpa ada informasi para bawahan atau anggota organisasi tidak dapat bekerja secara maksimal. Untuk itu menejer perlu melakukan komunikasi yang intensif dengan mereka-mereka yang tegabung dalam organisai.

c) Pengakuan

Untuk meningkatkan hasil yang maksimal, menejer perlu memberikan pengakuan atau penghargaan atas sumbangan yang telah di berikan. pengakuan ini bisa berupa materi maopun non materi.

d) Wewenang yang di delegasikan

Untuk dapat menghasilkan yang baik, makaperlu adanya delegasi wewenang yang cukup. tanpa adanya pemberian

wewenang para bawahan akan sulit untuk melakukan apa yang akan di kerjakan. Disamping itu dengan di berikannya wewenang tentu harus di sertai dengan tanggung jawab, atau dengan kata lain terdapat adanya keseimbangan antara wewenang dengan tanggung jawab.

e) **Perhatian Timbal Balik**

Para bawahan akan termotivasi untuk mencapai hasil yang baik, bila menejer menaruh perhatian terhadap hasil-hasil yang telah di capai bawahan. atau menejer mao memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dengan demikian semakin banyak menejer membantu bawahan dalam mencapai tujuan, maka semakin besar sumbangan bawahan atas tercapainya tujuan organisasi.²⁵

d. Pengarahan

1) **Pengertian Pengarahan**

Pengarahan berarti menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan. Pengarahan mencakup berbagai proses oprasi standar, pedoman dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran.

2) **Fungsi Pengarahan**

Fungsi pengarahan yakni keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi

²⁵Sri Wiludjeng, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 160-162.

kepentingan jangka panjang. Adapun fungsi pengarahan itu sendiri yakni :

- a) Melakukan orientasi tentang tugas yang akan dilakukan
- b) Memberikan petunjuk umum dan khusus.
- c) Mempengaruhi anggota.
- d) Memotivasi baik secara implisit maupun eksplisit.²⁶

3) Tujuan Pengarahan

Secara umum tujuan pengarahan yang ingin di capai pada setiap system perusahaan maupun organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin kontinuitas perusahaan
- b) Membudayakan proses standar
- c) Menghindari kemangkiran yang tak berarti
- d) Membina disiplin kerja
- e) Membina motivasi yang terarah.²⁷

IAIN JEMBER

²⁶<http://ilm4a7eng.wordprss.com/2012/04/25/fungsi-pengarahan-dalam-manajemen/> (09/03/2015)

²⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif deskriptif*, dengan jenis penelitian *study kasus (case study)*. Metode penelitian kualitatif adalah merupakan jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial yang berlangsung secara alamiah. Sedangkan study kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail di salah satu instansi Pemerintah yakni Dinas Koperasi Kabupaten Jember. Penulis memilih pendekatan *kualitatif deskriptif* mendeskripsikan data-data kualitatif yang ditemukan di lapangan untuk diolah dan dikritisi dalam bentuk penjelasan praktis.

Prinsip rasionalisme sebagai intisari dari konfigurasi epistemologi dan fenomenologi diharapkan mampu menjiwai penelitian kualitatif, agar relevansi antara sumber dan data lapangan menjadi koheren atau menjadi satu kesatuan yang utuh, saling *berkaitan* satu sama lainnya. Diharapkan dalam penelitian ini setidaknya mampu mem-back-up hal-hal urgen yang nantinya memuat beberapa ciri fundamental yang pernah diungkap, ciri-ciri penelitian kualitatif meliputi lima hal berikut : *Pertama*. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. *Kedua*. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis seperti hasil pengamatan, hasil pemotretan, cuplikan tertulis, dokumen dan catatan lapangan. *Ketiga*. Tekanan Penelitian kualitatif ada pada proses bukan hasil. *Keempat*. Penelitian

kualitatif sifatnya induktif, dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris atau induktif, *kelima*. Penelitian kualitatif mengutamakan makna, mengutamakan kepada bagaimana orang mengartikan hidup.²⁸

Berdasarkan pola dan ciri penelitian di atas, penulis menformulasikan teknik-teknik pendekatan empiris dengan fenomenologis untuk mewujudkan validitas data yang di inginkan dari obyek penelitian. Langkah awal yang ditempuh ialah mengumpulkan sumber-sumber data dan informasi yang diprioritaskan pada materi yang relevan dengan konsep-konsep dasar dalam skripsi ini. Dari teori-teori yang ditemukan akan berusaha mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk menguji kesesuaian relevansi sumber data dengan lapangan, langkah selanjutnya adalah memasuki arena lapangan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui prosedur penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, tujuannya agar lebih terfokus dan terarah sesuai dengan target semula.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Karimata Nomor 115 Jember. Alasan peneliti memilih Objek Penelitian di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jember karena menurut informasi atau wawancara yang penulis peroleh yakni Dinas Koperasi dan UMKM tersebut sangat berperan dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT RemajaRosdakarya, 2011), 1-30.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ditekankan pada sumber data manusia, yaitu orang-orang yang bisa memberikan informasi obyektif tentang Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember. Yang dimaksud sumber data, menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dari mana data diperoleh. Subyek penelitian ini terdiri dari kepala bidang UMKM, divisi UMKM, dan staff bagian umum, bagian perencanaan, yang biasa memberi informasi data-data tentang Peran Dinas Koperasi.

Dalam menentukan subyek penelitian, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan dua dasar pertimbangan. *Pertama*. Subyek penelitian hadir ke lapangan dan terlibat langsung mengamati proses pengelolaan dan proses yang terjadi di lapangan. *Kedua*. Keterlibatan mereka dalam mengembangkan usaha-usaha yang dikembangkan oleh LKMM atau pokmas selama satu bulan, dan sampai penelitian ini dilakukan mereka masih tetap aktif sebagai tenaga yang senantiasa mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM).

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, tetapi bukan berarti sangat tertutup untuk menggunakan metode-metode lain, apabila masih memungkinkan dan relevan bahkan sangat dibutuhkan, penulis akan memanfaatkannya demi tercapainya target dan tujuan suatu penelitian.²⁹

²⁹ Ahmad Tanzen, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 24

Dengan tiga komponen teknik atau metode diatas, peneliti dapat mengelola sesuai dengan prosedur dan pedoman pengumpulan data berikut:

1. Observasi

Metode observasi juga disebut dengan istilah metode pengamatan langsung melalui kegiatan pemusatan perhatian pada obyek penelitian dengan menggunakan indera. Jadi observasi dapat dilalui dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Semua ini termasuk pengamatan langsung sehingga observasi dapat dilakukan dengan tes, gambar, kusioner, dan suara perekam.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, *pertama* observasi murni (pure observation), *pertama* yaitu observasi yang dilakukan secara insidental, artinya obyek tidak berubah karena kedatangan peneliti atau dikenal dengan istilah obyek diskenariokan sebelum kedatangan peneliti, metode ini dilakukan dalam rangka mengamati aktifitas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM secara langsung, *kedua*. Observasi keterlibatan (***Participant Abservation***) ialah observasi yang dilakukan di lapangan dalam mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara biasanya digunakan sebagai cara cepat dan tepat dalam mengumpulkan data. Ada dua alasan yang bisa dikemukakan dalam penggunaan metode ini. *Pertama*, dengan wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang pernah dialami dan

diketahui oleh seorang informan, *kedua*. Apa yang akan ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang berkaitan dengan lintas waktu masa lalu dan masa sekarang, bahkan kalau perlu konsep-konsep rencana strategis (*renstra*) yang akan datang.³⁰

Untuk mencapai validitas data yang diperoleh, penulis menggunakan tujuh langkah wawancara berikut. *Pertama*. Menetapkan siapa saja yang akan diwawancarai. *Kedua*. Mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan dijadikan bahan wawancara. *Ketiga*. Menfokuskan alur pembicaraan. *Keempat*. Mengintegrasikan hasil wawancara dengan realita. *Kelima*. Mengkonfirmasi ringkasan hasil wawancara. *Keenam*. Menformulasikan hasil wawancara dalam bentuk catatan lapangan. *Ketujuh*. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Secara harfiah dokumentasi berarti catatan, surat, atau bukti, sedangkan yang dimaksud di sini adalah bukti-bukti fisik seperti foto-foto, dokumen Dinas Koperasi, arsip Dinas Koperasi, dan transkrip wawancara dengan kepala Dinas Koperasi. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan.³¹

³⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Prenadakencana, 2009), 108 - 114

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

Sebagai langkah dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dibutuhkan tindakan preventif untuk menghindari hilangnya data yang dikumpulkan dalam waktu yang relative lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan-pencatatan secara lengkap dan cepat setiap selesai mengumpulkan data dari lapangan, pengumpulan data berupa dokumentasi ini biasanya dilakukan secara simultan dalam masa yang sama antara aktifitas merumuskan dan menganalisa data lapangan. Dari paparan metode ini data yang ingin di peroleh adalah data gambar terkait yang berhubungan dengan kebutuhan data penelitian ini

E. Analisa Data

Analisa data merupakan upaya sistematis untuk menganalisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar pemahaman konseptual peneliti berfokus pada kesesuaian data sehingga disini diperlukan adanya *editing* data.

Analisa data dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, artinya keduanya berjalan serempak, disaat mengumpulkan data saat itu pula analisa data harus dikerjakan, baru dilanjutkan kembali setelah analisa data selesai. Dengan demikian secara teoritik pengumpulan data dan analisa data dilaksanakan secara berulang-ulang guna memecahkan masalah.³²

Teknik analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah menganalisa dengan cara menjelaskan, menverifikasi, mengevaluasi, dan

³²*Ibid*, 245-248.

menyimpulkan, sebab data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka, sehingga perlu interpretasi untuk mengetahui makna data tersebut. Dalam menganalisa data ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti yang disampaikan Miles dan Hebermen.³³ ada tiga hal yang harus dilakukan.

Pertama. **Data Reduction**. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisa data yang dilakukan selama pengumpulan data. Pada prinsipnya semua data lapangan sekaligus dianalisa, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan pola pokoknya, sehingga tersusun secara sistematis dan lebih mudah difahami, jika ada data yang sulit disimpulkan, maka proses reduksi data di ulang kembali.

Kedua. **Data Display**. Data ini dilakukan agar data yang diperoleh dengan jumlah banyak dapat dikuasai dengan cara dipilih dalam kelompok tertentu. Setiap data yang direduksi dapat disajikan untuk dianalisa dan disimpulkan. Apabila data yang disajikan belum disimpulkan maka data tersebut direduksi kembali untuk meningkatkan validitas data.

Ketiga. **Concluton drawing/verification**. Hal ini dimaksudkan untuk verifikasi makna data yang diperoleh untuk finising hasil analisa data. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat terasa masih tentatif, kabur, dan penuh keraguan akan tetapi dengan bertambahnya data yang digunakan dalam pembuatan kesimpulan akan mengubah situasi semula, dan akhirnya akan menemukan *emergent* data di lapangan.

³³B. Miles dan Hubermen, A. M, 1988, *Qualitatif Data Analisis* (California:Sage Publication, 1988), 21.

F. Keabsahan Data

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan keabsahan data-data yang diperoleh, diperlukan teknik-teknik dalam pemeriksaan data, tujuannya adalah agar bisa menjamin tingkat kesempurnaan data yang dicapai. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang sudah ada kemudian di sesuaikan antara data yang di peroleh melalui berbagai teknik pengumpulan data.³⁴

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun teknik-teknik triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi dengan sumber di antaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh informan satu dengan informan yang lainnya, yang dimaksud disini adalah informasi yang dikatakan kepala Dinas dengan Pelaku LKMM antar pribadi atau kegiatan Dinas.
3. Membandingkan tentang apa yang informen dengan realitas yang nyata.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi.

³⁴Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2011), 241

G. Tahap- Tahap Penelitian

Agar lebih terarah dan mengena pada sasaran dalam penelitian ini, perlu adanya tahapan-tahapan terorganisir yang perlu disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu peneliti menyusun tahapan penelitian berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini meliputi kegiatan penentuan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan ilmu pengetahuan, peninjauan latar belakang penelitian yang mencakup observasi awal di lapangan, permohonan izin penelitian kepada objek penelitian dan pihak-pihak terkait dengan obyek penelitian. Selain itu, juga perlu konsultasi lebih awal tentang proposal skripsi, penyusunan usulan penelitian, dan seminar proposal penelitian, baik dalam skala yang bersifat kecil atau yang bersifat tingkat tinggi.

2. Tahap Lapangan

Tahap ini merupakan proses pengumpulan data-data obyektif yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis secara kontinue dan maraton mencari data tentang Peran Dinas Koperasi dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM). Namun hal ini dilakukan setelah penulis mengantongi beberapa literatur tentang Dinas Koperasi UMKM, dan strategi atau metode yang relevan.

3. Tahap Analisa

Tahap ini merupakan program verifikasi data atau proses seleksi data-data yang dihasilkan dari obyek penelitian, baik penelitian langsung atau tidak langsung, baik dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM atau hasil instrumen, maupun dokumen yang dikumpulkan selama penelitian, setelah itu diadakan interpretasi sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek ulang data dengan menyerahkan data yang telah diolah ke informan atau yang biasa disebut *cek and rick* sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data, sehingga data benar-benar valid dan kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar pijakan untuk menentukan makna dalam proses penentuan kesimpulan terakhir. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nana Sudjana.³⁵ sebagai berikut :

Hasil dan kesimpulan dari penelitian diskriptif pada umumnya hanya mendeskripsikan konsep dan variabel yang diteliti, mendeskripsikan perbedaan konsep dan variabel, menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya.

4. Tahap Penyusunan laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pada pemberian makna. Setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan

³⁵Nana Sudjana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung:Rosda Karya, 1989), 53.

kritikan, perbaikan, dan saran atau koreksi penulisan skripsi, kemudian ditindaklanjuti dengan revisi penulisan dari hasil pemeriksaan dosen pembimbing. Langkah terakhir yang ditempuh peneliti adalah melakukan pengurusan kelengkapan administrasi untuk mengikuti ujian skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Dinas Koperasi UMKM Jember

Sebelum otonomi daerah nama Dinas Koperasi UMKM berubah-ubah dan berganti sesuai kebijakan pusat. Sebelum otonomi daerah dinas koperasi berada pada posisi sebagai kantor, sebelum orde baru namanya adalah jawatan koperasi. Jawatan Koperasi berada di bawah naungan Kementrian yang berganti-ganti. Pada zaman orde lama Jawatan Koperasi berada dibawah naungan Menteri Kehakiman, dan berubah di bawah Menteri Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi. Setelah itu berubah lagi menjadi Dinas Perdagangan Koperasi dan Kabulog (Kepala Badan Usaha Logistik).

Di era orde baru Dinas Koperasi kerjasama dengan Dinas Transmigrasi sehingga namanya berubah menjadi Perdagangan dan Koperasi. Pada zaman Menkop Radius Prawiro, dimana di bawahnya ada Menteri Muda Urusan Koperasi, beberapa saat kemudian ketika Menkop dijabat oleh bapak Gusnal Arifin tidak ada lagi Menteri Muda Urusan Koperasi. Kemudian ketika berganti menteri yaitu koperasi bapak Subiyanto Cakrawardaya, berganti lagi menjadi Departemen Koperasi dan PPK (Pembinaan Pengusaha Kecil), pada saat itu berkembang dan berevolusi dan berubah lagi menjadi Departemen UKM (Usaha Kecil Menengah). Setelah berganti menteri yaitu bapak Adi Sasono, nama itu

tidak berubah namun pada era reformasi berubah menjadi Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah. Pada otonomi daerah terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi yang semula dikabupaten disebut kantor jawatan koperasi seiring dengan kebijakan pusat pada tahun 2001 yang semula adalah kantor departemen koperasi berubah menjadi Dinas Koperasi UKM, pada saat bapak Mirfano masuk menjadi kepala Dinas, pada tahun 2006 ada perubahan nomenklatur di SOTK dinas Koperasi, bapak Mirfano mengusulkan kepada DPR kemudian di sepakati dan menjadi peraturan daerah tentang SOTK, Dinas Koperasi dan UKM berubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM, pada saat itu provinsi masih menggunakan UKM dan Jakarta pun masih menggunakan UKM. Jember mendahului penamaan Dinas Koperasi UMKM pada tahun 2006, baru pada tahun 2012 provinsi juga berubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur.³⁶

2. Visi dan Misi

a. Visi dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember

Menjadi satuan kerja pemerintah daerah yang kredibel dan efektif dalam mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM.

b. Misi dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember

Memberikan kontribusi nyata dalam membangun daerah, regional, dan nasional melalui pelayanan, pembinaan, fasilitas, dan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka

³⁶ Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM Jember

peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemandirian koperasi dan UMKM.

3. Legalisasi atau Badan Hukum Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember

Badan hukum Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember yaitu didasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. “Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan dan perlindungan serta pengembangan usaha seluas-luasnya”.³⁷

4. Struktur Organisasi

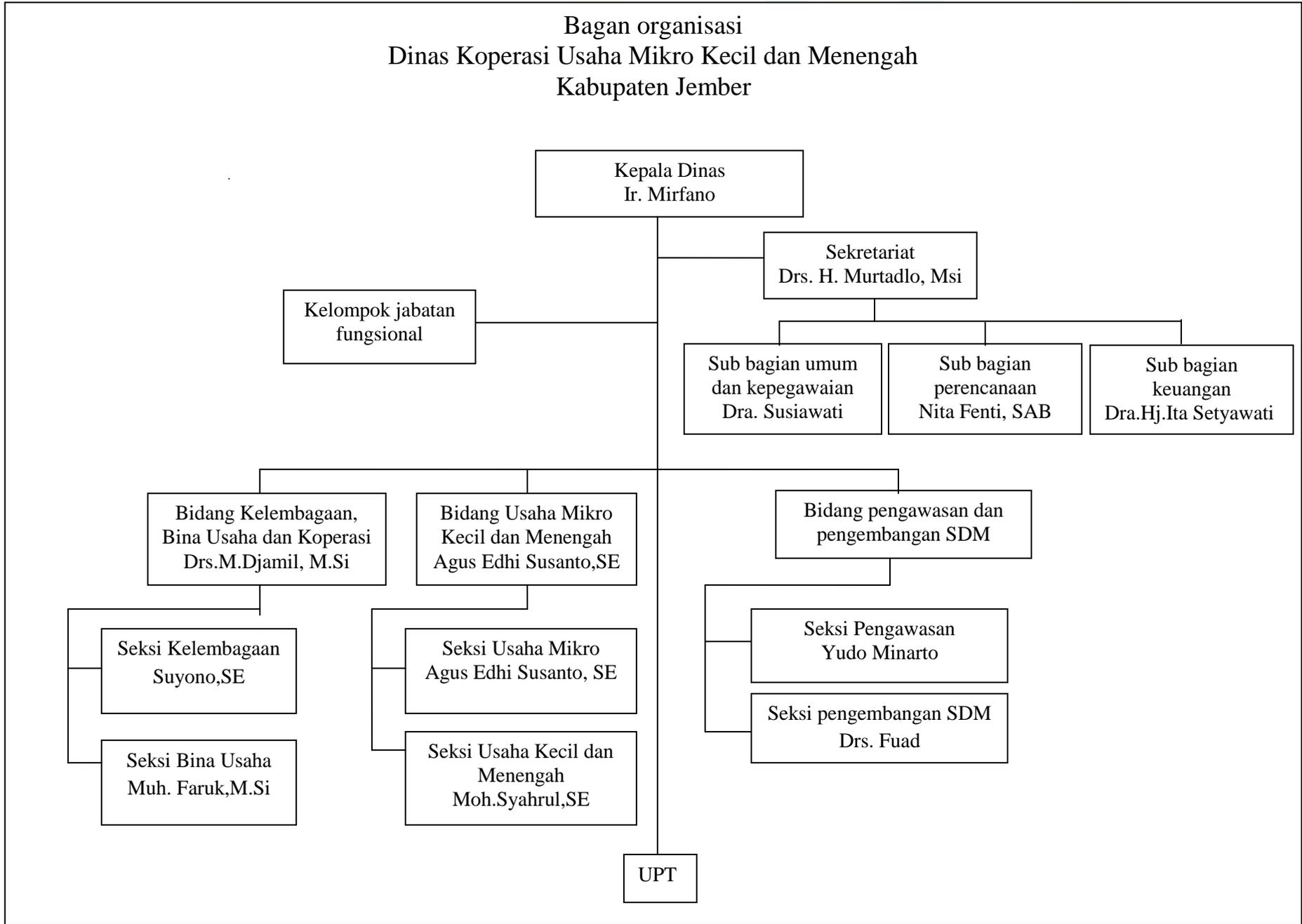
Adapun jumlah karyawan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember ada 56 orang, dimana keseluruhan pegawai yang berstatus PNS berjumlah 41 orang, dan petugas pendamping koperasi di lapangan berjumlah 10 orang dan pegawai honorer berjumlah 5 orang.³⁸ Adapun bagan struktur organisasi Dinas Koperasi UMKM Jember yaitu:

IAIN JEMBER

³⁷ Dokumentasi dinas koperasi UMKM Kabupaten Jember

³⁸ Ibid

Bagan organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember



5. Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember

Legalisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890)
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6074, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).
- k. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17

Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E).
- m. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2005 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.

6. Fungsi Dan Tujuan Dinas Koperasi UMKM Jember

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen UKM ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi yang telah ada saat ini dengan memberikan fasilitas komunikasi baru yang dapat :

- a. Mempercepat proses peremajaan data melalui internet.
- b. Menciptakan khususnya wadah promosi yg efektif dan bersifat global bagi masyarakat UKM.
- c. Menyediakan khususnya layanan sarana komunikasi dan edukasi bagi masyarakat UKM.

Sedangkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen UKM ditujukan untuk:

- a. Terbangunnya sistem basis data dan informasi usaha kecil menengah beserta entitas pelengkap yg berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UKM.
- b. Terimplementasikannya operasional Sistem Informasi Manajemen UKM.
- c. Terbangunnya Website Dinas Koperasi & UKM yang mampu menyampaikan berbagai data dan informasi melalui media Internet kepada berbagai pihak, terutama dalam rangka mengumpulkan data UKM dan pemeliharaannya secara online dan interaktif.
- d. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan dan memberikan informasi tentang UKM dan entitas pendukungnya secara lebih cepat, dinamis dan mudah didapat.
- e. Tersedianya perangkat lunak dan perangkat keras yang memenuhi kebutuhan pekerjaan pengumpulan dan pemeliharaan data dan informasi UKM. Demikian juga tersedianya sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Jember yang mampu mengelola dan menjalankan kegiatan tersebut.

Sedangkan Pelayanan Bidang Koperasi dan UMKM meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM
- b. Kelembagaan Koperasi, meliputi:

- 1) Inventarisasi koperasi dan penyediaan informasi koperasi, pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi.
 - 2) Pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan koperasi.
 - 3) Peningkatan kapasitas manajemen pengelola koperasi dan UMKM
- c. Pengembangan usaha produksi dan jasa, usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam meliputi:
- 1) Inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produksi dan jasa/konsumsi dan KSP
 - 2) Fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi
 - 3) Jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan
 - 4) Memberikan bimbingan teknis manajemen usaha, studi kelayakan.
 - 5) Memfasilitasi akses pemasaran
 - 6) Fasilitasi sertifikasi dan akreditasi
 - 7) Promosi produk koperasi produksi
- d. Pembinaan dan pengembangan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah meliputi:
- 1) Inventarisasi dan identifikasi potensi UMKM
 - 2) Fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha
 - 3) Pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan
 - 4) Pembinaan permodalan, pemasaran, dan promosi³⁹.

³⁹ <http://koperasi.umkm.jemberprov.go.id/hal-sejarah.html#ixzz3jhrLgOwj> (21/08/2015)

7. Manfaat Dinas Koperasi UMKM kabupaten Jember

Adapun manfaat yg ingin dicapai dari Pengembangan UMKM ini adalah:

- a. Sebagai sarana bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat UKM untuk memperoleh berbagai informasi yang terkait dengan usahanya dari Dinas Koperasi dan UKM, secara mudah dan cepat, baik secara pasif menerima informasi tersebut maupun secara aktif berinteraksi melalui imel dan forum diskusi elektronik.
- b. Sebagai sarana bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapatkan informasi balik dari pelaku UKM dan masyarakat pemerhati UKM dengan cara yang lebih efisien melalui media internet yang terjangkau.
- c. Sebagai sarana kontrol bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

8. LKMM di Kabupaten Jember

Sejak tahun 2005 dibawah kepemimpinan Bupati MZA. Djalal, dengan jargon “Membangun Desa, Menata Kota”, gerakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan. Gerakan itu kemudian dikemas dalam pembangunan di empat bidang prioritas, yaitu : 1). pendidikan, 2). kesehatan, 3). pertanian, dan 4). pembangunan infrastuktur. Sejak tahun itu, bersama-sama dengan Program GERDU TASKIN (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) dan PAM-DKB (Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM), beberapa program kemudian dilaksanakan, yaitu 1). Proyek Bedah Rumah, 2). Desa Binaan, 3). Pemberantasan Buta Huruf, dan 4).Kegiatan

Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM). Masing-masing program memiliki dimensi sasaran dan tujuan yang spesifik, karenanya program-program tersebut dilaksanakan oleh unit kerja yang berbeda-beda. Dalam konteks kesesuaian dengan misi MDGs, maka kegiatan-kegiatan tersebut semuanya termasuk dalam konteks pengentasan kemiskinan, di mana pada akhir masa Jabatan Bupati (Tahun 2010) angka kemiskinan di Kabupaten Jember dapat berkurang setengahnya.⁴⁰

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi UMKM) Kabupaten Jember merupakan penanggung jawab utama dari program PUM-RTM (Pemberdayaan Usaha Mikro- Rumah Tangga Miskin) ini. Dalam penyusunan kegiatan PUM-RTM (Pemberdayaan Usaha Mikro- Rumah Tangga Miskin), Dinas Koperasi UMKM telah melibatkan kalangan akademisi (Fakultas Ekonomi Universitas *Jember*) dan LSP (Lembaga Sosial dan Pembangunan), khususnya untuk menemukan keterkaitan antara masalah mendasar dalam kemiskinan dengan fungsi-fungsi pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang menjadi tugas pokok Dinas Koperasi UMKM.

Kesepakatan di atas menyimpulkan, bahwa kemiskinan diciptakan oleh institusi dan kebijakan yang mengitarinya, yaitu berupa institusi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu rekayasa institusi sosial

⁴⁰Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM Jember

ekonomi(*social-economic-engineering*) dan kebijakan menjadi keharusan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dinas Koperasi UMKM selaku SKPD (Satuan Kerja Pamerintah Daerah) penanggung jawab kegiatan PUM-RTM mengerahkan SDM internal sebanyak 14 orang setiap tahun yang terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang pejabat eselon III, 1 orang pejabat eselon IV, 3 orang staf administrasi serta 8 orang staf lapangan yang berperan sebagai pendamping (*technical assistances*). Adapun SDM eksternal yang dikerahkan meliputi 186 orang yang terdiri dari para tokoh relawan pengurus LKMM yang melayani 4.436 orang anggota LKMM (data Mei 2015) yang tersebar di 31 dusun, 20 desa/kelurahan dan 14 kecamatan. LKMM dikelola oleh 6 orang pengurus dengan tugas yang berbeda-beda diantaranya koordinator, juru buku, kasir, analis pinjaman, juru tagih dan pengawas. Pengusaha mikro anggota LKMM yang dimaksud antaranya pedagang bakso, mlijo (Penjual sayur keliling), pedagang es, penjual bensin eceran, mindring, pembuat tape, penganyam bambu, pembuat krupuk, penjual makanan, penjual ikan, pedagang buah, pembuat arang, pracangan, penjual barang bekas. dan berbagai jenis usaha lainnya.⁴¹

Diantara SDM internal yang bekerja, staf lapangan merupakan personil yang memiliki peranan penting dalam membentuk LKMM dan Kelompok-kelompok masyarakat di wilayah pedusunan serta mendampingi secara periodik. Mereka bekerja atas dasar SOP yang

⁴¹ Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember

telah ditetapkan oleh kepala dinas dan sebelum diterjunkan ke lapangan, mereka juga telah mendapat bekal tentang misi PUM-RTM sebagai aktifitas yang menyentuh langsung wajah si miskin dan menolong keluarga miskin untuk keluar dari persoalan sosial ekonomi yang dihadapinya.

Sedangkan cara Dinas Koperasi UMKM dalam rekrutmen pengurus LKMM adalah dengan cara *grounded*. *Grounded* adalah suatu cara rekrutmen dengan turun ke lapangan mencari informasi dari perangkat-perangkat desa setempat. Hal ini dilakukan agar pengurus yang akan terpilih minim cacat sosialnya.

9. Produk LKMM

Adapun produk yang dihasilkan oleh LKMM adalah sebagai berikut

- a. Sipintar (Simpanan Petani Regional), simpanan sukarela bagi kelompok tani yang bisa diambil sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- b. Sihara (Simpana Hari Raya). Simpanan berjangka yang hanya boleh diambil saat hari raya
- c. Kuperta (Kredit Usaha Pertanian). Kredit yang diperuntukkan bagi petani dengan menggunakan anggunan
- d. Kusuma (Kredit Usaha Masyarakat). Kredit yang dibreikan kepada pengusga-pengusaha usaha mikro yang pembayaran diangsur tiap bulan.
- e. KUM RTM (Kredit Usaha Masyarakat). Kredit yang diberikan dengan dana hibah Pemda untuk LKMM.

10. LKMM Di Kabupaten Jember Yang Dibentuk Oleh Dinas Koperasi Jember

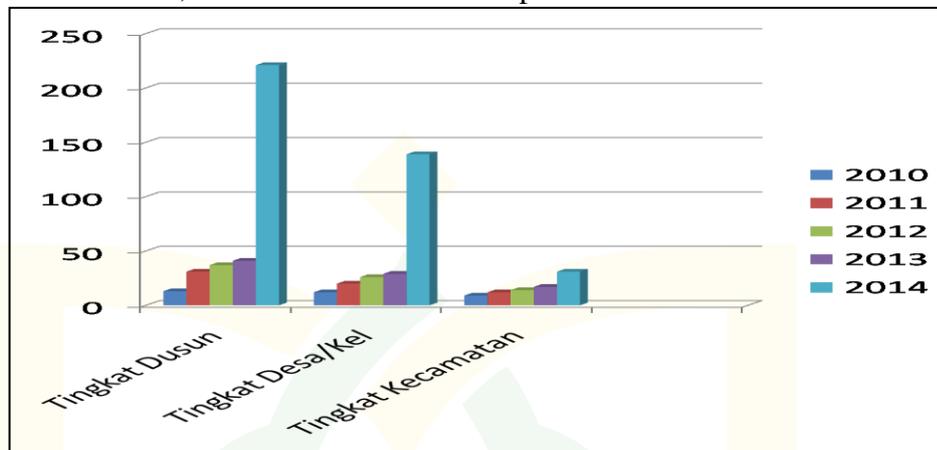
Banyaknya LKMM di Kabupaten Jember dari tahun 2006 – 2011 dapat dilihat dalam Gambar 1.3. terjadi lonjakan jumlah yang tinggi sekali di tahun 2013 – 2014. Selengkapnya adalah sebagai berikut: tahun 2006 sebanyak 13 unit, tahun 2007 sebanyak 31 unit, tahun 2008 sebanyak 37 unit, tahun 2009 sebanyak 41 unit, tahun 2010 sebanyak 219 unit, serta tahun 2011 sebanyak 299 unit.

Sejumlah LKMM tersebut di atas tersebar ke dalam dusun, desa/kelurahan, serta kecamatan. Berturut-turut dari tahun 2010 – 2014 adalah keberadaan LKMM yaitu di: 12 ds/kelurahan, 20 desa/kelurahan, 26 desa/kelurahan, 29 desa/kelurahan, serta terakhir tahun 2014 sebanyak 139 desa/kelurahan.⁴²

Sementara keberadaan LKMM di sejumlah kecamatan berturut-turut dari tahun 2010 – 2014 adalah di: 9 kecamatan, 12 kecamatan, 14 kecamatan, 17 kecamatan, dan tahun 2010 berada di 31 kecamatan. Kondisi ini secara konkrit dapat dilihat di Gambar 1.1

⁴² Dinas Koperasi UMKM, *Data Primee Perkembangan LKMM*, Jember, 2014

Gambar 1.1
Banyaknya LKMM Menurut Tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/
Keluarahan, serta Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2014



Jadi, Permodalan yang dianggarkan lewat APBD dalam mengembangkan LKMM di kabupaten jember sudah menyebar lebih dari 80 persen wilayah kabupaten Jember. Bahkan modal yang sudah dikelola dengan sangat produktif. Dengan modal tersebut, LKMM sebagai lembaga keuangan sudah dapat mengelolah menjadi lembaga keuangan yang tepat untuk pelaku-pelaku usaha mikro.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis data ini akan dikemukakan tentang peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember dalam mengembangkan LKMM.

Ada Empat peranan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember dalam mengembangkan LKMM yang akan dibahas secara terperinci pada pembahasan ini. Empat peranan tersebut yakni peran permodalan LKMM, peran motivasi, peran pengawasan dan peran pengarahan

1. Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat

Perekonomian Indonesia pada masa sekarang sedang mengalami perubahan dan gangguan-gangguan baik dari segi internal maupun eksternal. Perubahan ini disebabkan adanya banyak krisis ekonomi dan suasana politik yang tidak menentu. Akibatnya masyarakat banyak mengalami kesulitan dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, misalnya banyak didirikannya Koperasi-Koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang di harapkan sehingga berperan nyata dalam perekonomian khususnya Rakyat. Mengingat Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari anggota yang mempunyai kemampuan terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Adapun Tujuan didirikannya Koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian Di Susun Berdasarkan Kekeluargaan”. Melihat kedudukannya, maka peranan koperasi sangat penting dalam mewujudkan kehidupan Demokrasi ekonomi.

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat memiliki empat peran penting, yaitu dalam Permodalan, Pengawasan, Motivasi, dan Pengarahan. Empat peran tersebut diharapkan dapat membantu Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat

dalam berwirausaha dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kecil dan menjadi motivator untuk Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat jika suatu saat terjadi permasalahan.

2. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Permodalan LKMM

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember berperan sebagai penyalur modal. Modal tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Jember baik dengan status hibah maupun pinjaman bergulir, pinjaman dari APBD Propinsi Jawa Timur serta donasi dari institusi maupun perorangan yang peduli. Pengurus LKMM bertanggung jawab atas keberlanjutan pembiayaan untuk usaha mikro sehingga harus dikelola secara profesional, demokratis, transparan dan akuntabel dengan mengacupada AD-ART (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga) yang telah disepakati bersama. Sedangkan Pokmas RTM (Rumah Tangga Miskin) bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman secara tepat waktu

Menurut Moh. Djamil, Kepala Bidang UMKM Kabupaten Jember menyampaikan “Pada awal inovasi Tahun Anggaran 2010 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember sebesar Rp. 100 juta. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pembentukan 2 unit LKMM pada 2 wilayah lingkungan, penguatan kelompok 12 Pokmas (60 orang) dan penyediaan modal usaha dalam bentuk hibah sebesar Rp. 50 juta yang dikelola dengan pola simpan pinjam tanggung renteng”⁴³.

Pada Tahun Anggaran 2013 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD sebesar Rp. 1.100.000.000 M yang dipergunakan untuk membentuk

⁴³ M.Jamil, *wawancara*, Kepala Bidang Dinas Koperasi UMKM, Dinas Koperasi Kabupaten Jember,(15 Juni 2015)

11 unit LKMM baru pada 11 dusun, penguatan kelompok 176 pokmas (880 orang) dan penyediaan modal usaha dalam bentuk hibah sebesar Rp. 590.000.000. Pada Tahun Anggaran 2014 kegiatan PUM-RTM dibiayai APBD sebesar Rp. 1.500.000.000 M yang dipergunakan untuk membentuk 18 unit LKMM, baru pada 18 dusun, penguatan kelompok 180 pokmas (900 orang) dan penyediaan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak sebesar Rp. 685 juta. Pada Tahun Anggaran 2013 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD sebesar Rp. 705.000.000 yang dipergunakan untuk membiayai pembentukan 3 unit LKMM baru pada 3 dusun, penguatan kelompok 30 pokmas (150 orang), penyediaan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak sebesar Rp. 75.000.000 serta peningkatan keterampilan khususnya bagi anggota 13 unit LKMM yang telah operasional selama 1-2 tahun.

Total investasi Pemerintah Daerah dalam kegiatan PUM-RTM termasuk pengembangan LKMM selama 4 tahun anggaran mencapai Rp. 3.382.141.700,- yang peruntukannya meliputi penguatan institusi sebesar Rp. 1.510.826.350,-, penguatan modal usaha sebesar Rp. 1.360.800.000,- yang sampai saat ini beredar dalam bentuk pinjaman lunak untuk pengusaha mikro anggota LKMM serta peningkatan keterampilan sebesar Rp. 510.515.350,-.

Menurut Ibu Supiyangingtyas sebagai bendahara LKMM Iwakra dusun krajan desa Kebonsari, mengatakan bahwa “saya mendapatkan dana 2 kali mas, yang pertama itu 15 juta, dan yang kedua 25 juta, jadi totalnya semua 40 juta”⁴⁴.

⁴⁴ Supiyangingtyas, anggota LKMM, *wawancara*, LKMM Krajan Kebonsari, (20 Oktober 2015)

Apabila dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan sebanyak 4.423 orang (data Mei 2014) maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan menggunakan design PUM-RTM sebagai pola pengembangan LKMM diperlukan dana sebesar Rp. 764.672,-/orang. Nilai rasio dimaksud akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan meningkatnya jumlah anggota LKMM yang akan terjadi secara sistematis.⁴⁵

Jadi, Permodalan yang dianggarkan lewat APBD dalam mengembangkan LKMM di Kabupaten Jember sudah menyebar lebih dari 80 persen wilayah kabupaten Jember. Bahkan modal yang sudah dikelola dengan sangat produktif. Dengan modal tersebut, LKMM sebagai lembaga keuangan sudah dapat mengelola menjadi lembaga keuangan yang tepat untuk pelaku-pelaku usaha mikro.

Menurut Moh. Djamil, Kepala Bidang UMKM mengatakan bahwa “Modal yang diberikan oleh Pemda yang berupa hibah menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Koperasi,UMKM. Sebab masyarakat, khususnya anggota-anggota pokmas tidak mengembalikan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum LKMM”. Sebagaimana masyarakat tidak mau mengembalikan kepada LKMM sebab dana tersebut adalah hibah. Masyarakat menganggap dana hibah tidak wajib dikembalikan.⁴⁶

Menurut peneliti, dilihat dari definisi hibah dalam fiqh muamalah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Jadi dalam hal ini memang jika ditinjau dari Hukum Islam, hibah tidak seharusnya diganti. Jika dilihat

⁴⁵ Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM Jember

⁴⁶ Moh. Djamil, Kepala Bidang UMKM, *wawancara*, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember (15 Juni 2015)

dari peran Dinas Koperasi, maka dinas koperasi tidak menerima pengganti dari dana hibah tersebut, karena fungsi dari dinas koperasi sendiri yaitu hanya menyalurkan dana dari pemerintah kepada LKMM, untuk selanjutnya LKMM itu berdiri sendiri tanpa adanya unsur nama koperasi.

Hal ini senada dengan Agus Edhi Susanto, Kasi Usaha Mikro dinas Koperasi,UMKM kabupaten Jember mengatakan “LKMM merupakan embrio dari koperasi yaitu upaya dari Pemerintah Daerah bersama Dinas Koperasi supaya masyarakat berfikir kritis, untuk mikir sendiri untuk keluar dari kemiskinan bersama-sama orang lain. Ini sudah cikal bakal koperasi, kita tidak bicara koperasi dan tidak menyinggung sama sekali nama koperasi, itu adalah milik masyarakat sendiri dalam ruang lingkup mikro dan pemberdayaannya meliputi pola simpan pinjam.⁴⁷

Jadi, dalam hal ini Dinas Koperasi tidak ada sangkut pautnya dengan LKMM, namun Dinas Koperasi hanya memberikan modal yang berupa dana hibah tersebut dari pemerintah, dan memotivasi para LKMM, juga mengawasi dan memberikan pengarahan kepada LKMM agar usaha mikro kecil mereka dapat berkembang dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi mereka. Mengenai dana yang sudah masuk kepada LKMM terserah kepada LKMM sendiri mau digunakan untuk apa dana tersebut, Dinas Koperasi hanya memberikan gagasan, motivasi, mengawasi dan pengarahan saja.

Dalam operasionalnya, LKMM menggunakan dana hibah dan menyalurkannya kepada kelompok masyarakat (pokmas) dengan menggunakan sistem simpan pinjam. Hal ini senada dengan apa yang

⁴⁷Agus Edhi Susanto, Kasi Usaha Mikro, *wawancara*, Dinas Koperasi UMKM kabupaten Jember (12 Juni 2015)

dipaparkan oleh anggota LKMM dusun Krajan, desa Kebonsari yaitu Ibu Supiyaningtyas.

Menurut Ibu Supiyaningtyas, mengatakan bahwa “dalam penyaluran kepada kelompok masyarakat itu pake simpan pinjam, pinjamnya per orang itu ada yang Rp 500.000 ada yang Rp 1.000.000, pengembaliannya per minggu itu 1,5 persen, jadi selama 10 minggu karena kita pake mingguan kalo 10 minggu itu 5%, ada simpanan wajib Rp 1000,00. Modal tersebut digunakan kelompok masyarakat dengan alasan jual pulsa, ada yang tukang bakso, ada yang jual sosis,dan lainnya”.⁴⁸

Dalam hukum Islam hal ini seharusnya tidak dilakukan, karena dikhawatirkan akan masuk kepada riba, karena dalam operasionalnya menggunakan bunga.

3. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengawasan LKMM

Pengawasan dinas koperasi terhadap LKMM ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melalui laporan keuangan setiap bulan dan pengawasan langsung dengan cara mengirim beberapa petugas ke beberapa LKMM setiap minggu.

Pengawasan melalui laporan keuangan dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan keuangan yang disetorkan oleh beberapa pokmas atau kelompok dari beberapa daerah yang melaporkan melalui LKMM. Jika dalam laporan keuangan LKMM (Contoh Laporan Keuangan sebagaimana terlampir).

Menurut Agus Edhi Susanto, Kasi Usaha Mikro dinas Koperasi,UMKM kabupaten Jember mengatakan“Jika Piutangnya besar sedangkan hasil dari usahanya sedikit sekali dalam setiap bulan,

⁴⁸ Supiyaningtyas, anggota LKMM, *wawancara*, LKMM Krajan Kebonsari, (20 Oktober 2015)

maka LKMM tersebut sangat kurang produktifitasnya. Jika pendapatannya besar setiap bulannya maka LKMM tersebut produktif” Sedangkan apabila sebaliknya agus menambahkan “tetapi jika penghasilannya dua kali lipat dari banyaknya hutang maka LKMM tersebut sudah dapat dibilang maju dan produktif”.⁴⁹

Sedangkan pengawasan yang dilakukan dengan cara mengirim dua sampai tiga petugas ke beberapa lokasi LKMM setiap minggu adalah dalam rangka mengamati beberapa LKMM baik dari segi kelemahan dan kelebihan. Hal tersebut dilakukan agar LKMM terkontrol perkembangannya.

Menurut Ibu Supiyaningtyas sebagai bendahara LKMM Iwakra dusun krajan desa Kebonsari, mengatakan bahwa “kalau dari segi pengawasan, karena memang dari awal saya nol dalam pembukuan, seperti cara membuat neraca gitu, saya selalu didampingi pengawasnya yaitu ibu farida, sampai sekarang saya bisa buat laporan sendiri. Tapi tetap juga masih dipantau”.⁵⁰

Hal ini membuktikan bahwasanya Dinas Koperasi UMKM sangat bertanggung jawab kepada para LKMM, bisa dikatakan dari segi pengawasan sangat baik dalam mengawasi para LKMM sehingga sesuai dengan tujuan.

Menurut Yudo Minarto, Kasi Pengawasan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, mengatakan “pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM menggunakan analisa SWOT (*Strength, weaken, opportunity, treath*) baik dari aspek negatif maupun positifnya”.⁵¹

Adapun hasil dari analisa yang dilakukan tersebut adalah seperti pada tabel berikut:

⁴⁹Agus Edhi Susanto, Kasi Usaha Mikro, *wawancara*, Dinas Koperasi UMKM kabupaten Jember(12 Juni 2015)

⁵⁰Supiyaningtyas, anggota LKMM, *wawancara*, LKMM Krajan Kebonsari, (20 Oktober 2015)

⁵¹Yudo Minarto, Kasi Pengawasan, *wawancara*, Dinas Koperasi,UMKM Kabupaten Jember (29 Juni 2015)

Tabel 1.1
Kuadran hasil analisa SWOT LKMM yang dilakukan Dinas Koperasi
UMKM Kabupaten Jember Tahun 2015

INTERNAL FAKTORS	EKSTERNAL FAKTORS	The SWOT Analisis
<p>STHRENGTHS (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasinya jelas dan sesuai dengan keberadaan LKMM 2. Keanggotaan bersifat sukarela 3. Baiknya citra LKMM di mata masyarakat 4. Resiko kurangnya anggota kecil 5. Biaya bunga relatif kecil dibanding dengan badan usaha lain 6. Kepengurusan dilakukan secara <i>grounded</i>. 7. Memungkinkan unit usaha yang dapat dikelola banyak 8. Komitmen pengurus untuk memajukan usaha LKMM 	<p>OPPORTUNITIES (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prioritas perhatiandari pemerintah 2. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan tuntutan masyarakat untuk lebih membangun LKMM. 3. Kondisi ekonomi masyarakat cukup mendukung eksistensi LKMM. 4. Industrialisasi membuka peluang diversifikasi usaha sesuai dengan struktur perekonomian Jember. 5. Adanya peluang pasar bagi produk yang dihasilkan LKMM. <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya investor yang ingin bekerjasama dengan 	<p>POSITIVE FACTORS</p>

	<p>LKMM.</p> <p>2. Dukungan kebijakan dari pemerintah.</p> <p>3. Daya beli masyarakat tinggi.</p>	
<p>WEAKNESSES (Kelemahan)</p> <p>1. Belum berbadan hukum</p> <p>2. kinerja LKMM masih banyak yang jauh dari harapan</p> <p>3. Lemahnya struktur permodalan LKMM.</p> <p>4. Lemahnya pengelolaan atau manajemen usaha LKMM.</p> <p>5. Kurangnya pengetahuan bisnis dan ketrampilan teknis dalam bidang usaha yang dilakukan</p> <p>6. Kurang memadainya profesionalisme SDM di LKMM.</p> <p>7. Kurangnya inovasi dari pengelola LKMM.</p> <p>8. Kurangnya penguasaan teknologi.</p>	<p>THREATS (Ancaman)</p> <p>1. Semakin ketatnya persaingan usaha</p> <p>2. Terbatasnya jumlah kredit yang dialokasikan LKMM</p> <p>3. Masih kurangnya kepercayaan untuk bekerjasama dengan pelaku ekonomi lain</p> <p>4. terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi informasi</p> <p>5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang LKMM</p> <p>6. Ancaman pasar bebas.</p> <p>7. Kurang memadainya sarana dan prasarana</p> <p>8. Menurunnya daya beli masyarakat.</p>	<p>NEGATIVE FACTORS</p>

Sumber : Humas Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember

Jadi, dilihat dari jenis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi merupakan pengawasan *concurrent*, dimana dalam buku Richard L. Draft mengemukakan bahwa pengawasan *concurrent* tidak dilakukan selama kegiatan berlangsung. Hal ini sama dengan Dinas Koperasi yang hanya mengawasi laporan keuangan setiap bulan saja atau mengawasi langsung dengan cara mengirim petugas ke LKMM setiap minggu. Selain itu Dinas Koperasi juga menggunakan analisa SWOT (*Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats*) sebagai pengawasan untuk meminimalisir resiko yang terjadi di kemudian hari.

Menurut peneliti pengawasan seperti ini bagus diterapkan, meski lebih baiknya pihak Dinas Koperasi mengawasi langsung ke pihak LKMM tersebut. namun penggunaan analisis SWOT juga berperan penting terhadap kelangsungan usaha mikro kecil yang dilakukan LKMM, sehingga operasionalnya berjalan dengan optimal.

4. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memotivasi LKMM

Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dalam memotivasi pengembangan LKMM di kabupaten Jember ada beberapa jenis pendekatan. Mulai dari pendekatan yang dilakukan dengan membuat acara formal seperti pengadaan agenda seminar dan sejenisnya, sampai pendekatan *Reward* (hadiah).

Acara rutinitas yang setiap tahun diadakan dalam rangka menjaring anggota baru LKMM adalah acara Refleksi kemiskinan dan pelatihan *creative intreprenuer*.

Menurut Agus Edhi Susanto, Kasi Usaha Mikro Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember mengatakan “Acara refleksi kemiskinan adalah acara kontemplatif yang bertujuan untuk penyadaran tentang sebab musabab kemiskinan yang pastinya bisa ditanggulangi, sedangkan pelatihan *creative intreprenuer* menurutnya adalah untuk melatih para peserta pokmas LKMM kreatif dalam berbisnis. Sehingga lewat pelatihan ini, para peserta akan termotivasi untuk berwira usaha karena sudah mudah membuat sesuatu yang baru dari barang yang sederhana.”⁵²

Menurut ibu Supiyaningtyas sebagai bendahara LKMM Iwakra dusun krajan desa Kebonsari, mengatakan bahwa “kalau motivasi sering, kadang dapat undangan dari Dinas Koperasi, kadang-kadang 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali”.⁵³

Sistem *Reward* dilakukan setiap tahun. LKMM yang mempunyai kas tertinggi dan kedisiplinan yang kuat akan mendapatkan *Reward* berupa modal dana untuk pengembangan bisnis pokmas. *Reward* bertujuan untuk memberikan motivasi agar setiap LKMM berlomba-lomba dalam mengembangkan bisnisnya.

Menurut ibu Supiyaningtyas sebagai bendahara LKMM Iwakra dusun krajan desa Kebonsari, mengatakan bahwa “dulu memang ada, kayak di tv gitu mas, LKMM award apa gitu, karena memang kebetulan LKMM disini itu namanya Iwakra, katanya termasuk bagus jadi pernah dapat hadiah, masuk LKMM award gitu”.

Sebaliknya, dalam memotivasi LKMM Dinas Koperasi UMKM tidak memberikan *punishment* (hukuman) kepada beberapa LKMM yang kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebab Dinas Koperasi,

⁵²Agus Edhi Susanto, Kasi Usaha Mikro Dinas Koperasi UMKM, wawancara, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 01 Agustus 2015

⁵³Supiyaningtyas, anggota LKMM, wawancara, LKMM Krajan Kebonsari, (20 Oktober 2015)

UMKM selain tidak punya wewenang apapun pada LKMM yang mempunyai peraturan hukum sendiri. Dinas Koperasi, UMKM hanya bertugas memberikan support dan mendampingi proses dan pengembangan LKMM

Selain itu, Dinas Koperasi UMKM juga berperan dalam mengembangkan Pokmas-Pokmas di bawah LKMM. Dinas Koperasi, UMKM juga memotivasi kaum hawa (perempuan) agar dapat juga ikut serta dalam mengembangkan LKMM. Para perempuan dimotivasi agar dapat melakukan bisnis mikro khususnya dalam aspek produktivitas dengan modal yang disediakan dari dana hibah yang ada di LKMM. Wanita-wanita diberikan motivasi dan pelatihan agar mau dan mampu melakukan pengembangan ekonomi mikro khususnya ekonomi keluarganya sendiri.

Dalam hal ini 'para perempuan diberi pemahaman dan penyadaran bahwa perempuan sebagai wanita yang diasumsikan menjadi makhluk nomer dua setelah laki-laki juga sebenarnya dapat juga membantu ekonomi keluarganya. Tentunya tanpa harus menghilangkan fitrahnya sebagai seorang perempuan.

Jadi, Dinas Koperasi memotivasi LKMM dengan menggunakan agenda seminar, pelatihan sampai pendekatan *Reward* (hadiah). Dalam buku Wilson Bangun, Intisari Manajemen, jenis motivasi seperti ini merupakan motivasi positif, yaitu dorongan terhadap karyawan yang dapat berupa misalnya hadiah, pujian, insentif, piagam, dan lain sejenisnya.

Menurut peneliti hal ini sangat baik dilakukan mengingat masyarakat miskin yang terbelakang menjadi semangat untuk mengikuti agenda atau program yang direncanakan oleh Dinas Koperasi, sehingga jika mereka termotivasi, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya dan pastinya ekonomi mereka akan lebih lancar.

5. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengarahan LKMM

Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM ada dua jenis yaitu pengarahan yang berbentuk program dan pengarahan secara langsung.

Pengarahan program dilakukan dengan cara mendatangi LKMM yang dipandang membutuhkan pengarahan. Pengarahan secara langsung ini dilakukan sesuai kebutuhan beberapa LKMM. Pengarahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan secara langsung sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya.

Pengarahan secara langsung juga bisa dilakukan dengan cara memanggil LKMM yang bermasalah atau membutuhkan bantuan. Dalam hal ini bahkan Dinas Koperasi UMKM mengumumkan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang berperan dalam LKMM bahwa Dinas Koperasi UMKM membuka secara bebas orang yang butuh konsultasi untuk langsung datang kantor Dinas Koperasi UMKM⁵⁴.

⁵⁴*Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Masyarakat (LKMM), Dinas Koperasi,UMKM Kabupaten Jember, 2013.*

Menurut ibu Supiyaningtyas sebagai bendahara LKMM Iwakra dusun krajan desa Kebonsari, mengatakan bahwa “kalau pengarahan ya pengawasnya itu terjun langsung kalau saya ada kesulitan apalagi yang namanya keuangan sudah gag asing lagi, yang namanya macet gitu pasti ada”.⁵⁵

Dalam hal ini artinya Dinas Koperasi tidak hanya memanggil LKMM yang memiliki keluhan masalah, namun juga terjun langsung ke lapangan. Hal ini lebih efektif untuk memberikan solusi kepada LKMM yang bermasalah.

Sedangkan pengarahan yang dilakukan dengan mengadakan program-program adalah pengarahan yang sudah pasti diadakan oleh Dinas Koperasi UMKM sesuai dengan Rapat kerja yang telah dimusyawahkan. Adapun program-program tersebut adalah sebagaimana di bawah ini :

a. Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Moh. Djamil Kepala bidang Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember mengatakan “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, profesionalisme, keterampilan dan wawasan para pengurus maupun anggota, termasuk kemampuan manajemen dan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya serta mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang yang terbuka bagi pengembangan kegiatan usaha baru”.⁵⁶

Hal demikian akan mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi masyarakat luas, sehingga LKMM benar-benar mampu menjadi semangat usaha masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan, serta rasa pengabdian dan tanggung jawab para pembina

⁵⁵ Supiyaningtyas, anggota LKMM, *wawancara*, LKMM Krajan Kebonsari, (20 Oktober 2015)

⁵⁶ Moh. Djamil, Kepala Bidang Dinas Koperasi UMKM, *wawancara*, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember , 15 Juni 2015

LKMM agar efisiensi dan efektivitas pembinaan LKMM makin meningkat.

Menurut Moh. Djamil Kepala Bidang Dinas Koperasi UMKM menjelaskan “program penyuluhan anggota LKMM bertujuan menumbuhkan rasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan LKMM menjadi gerakan nasional.⁵⁷

Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, serta bimbingan dan konsultasi usaha yang memadai.
- 2) meningkatkan pemahaman tentang peran LKMM bagi anggota tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa LKMM, antara lain melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha. kegiatan ini didukung dengan penyempurnaan materi dan metode pelaksanaan pendidikan anggota agar lebih meningkatkan peran serta mereka.
- 3) meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui kelompok untuk mengoptimalkan potensi usaha perseorangan anggota.
- 4) meningkatkan pendidikan tentang LKMM bagi pengurus/pengelola usaha melalui penyuluhan, pelatihan manajemen, dan keterampilan usaha, praktek kerja (magang), studi banding, dan bimbingan

⁵⁷Moh. Djamil, Kepala Bidang Dinas Koperasi UMKM, wawancara, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 15 Juni 2015

penyusunan kelayakan usaha terapan yang memanfaatkan teknologi tepat guna.

- 5) meningkatkan pelatihan dan penataran perLKMM-an bagi fasilitator, kader, serta wanita, pemuda, dan kelompok strategis lainnya yang berpotensi menjadi motivator LKMM.
- 6) meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pembina LKMM, termasuk petugas konsultan lapangan
- 7) meningkatkan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan teknis, serta penyediaan informasi teknologi dalam rangka alih teknologi.
- 8) meningkatkan pelayanan konsultasi manajemen bagi LKMM.
- 9) mengembangkan sistem balas jasa yang menarik bagi pengelola LKMM.
- 10) mewujudkan proses kaderisasi yang sehat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang LKMM.
- 11) memasyarakatkan LKMM melalui penyuluhan tentang LKMM untuk mewujudkan LKMM menjadi gerakan nasional”⁵⁸

b. Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan LKMM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemupukan modal dan meningkatkan kemampuan memanfaatkan modal, dalam rangka menyetatkan struktur permodalan LKMM.

Program ini ditempuh terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

⁵⁸ Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember

- 1) meningkatkan fasilitas pembiayaan dan jaminan pembiayaan yang dibutuhkan LKMM dan anggotanya.
- 2) Mengarahkan pengembangan lembaga keuangan LKMM, antara lain dalam bentuk LKMM simpan pinjam, LKMM bank perkreditan rakyat, LKMM pembiayaan, dan LKMM asuransi.
- 3) memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada anggota LKMM untuk meningkatkan pemupukan modal sendiri, terutama yang berasal dari simpanan anggota dan dana cadangan, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penyusunan kelayakan usaha dan pemanfaatan modal LKMM.
- 4) memberikan pengarahan dan kemudahan bagi LKMM yang telah berkembang dan maju untuk melakukan diversifikasi produk. Dan
- 5) mengarahkan pemupukan modal penyertaan pada LKMM, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat.

c. Program Peningkatan dan Perluasan Usaha LKMM

Menurut Supyan sebagai sub bagian perencanaan Dinas Koperasi mengatakan bahwa “Program ini bertujuan untuk mengarahkan agar LKMM memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya, antara lain dengan meningkatkan promosi usaha, menyediakan informasi peluang usaha dan pasar, mengembangkan jaringan pemasaran, melaksanakan misi dagang, menyediakan sarana dan prasarana pemasaran, memberikan bimbingan dan konsultasi pemasaran, serta memantapkan sistem distribusi”.⁵⁹

d. Program Kerja Sama Antar LKMM dan Kemitraan Usaha

Menurut Supyan sebagai sub bagian perencanaan Dinas Koperasi mengatakan bahwa “Program ini bertujuan untuk meningkatkan

⁵⁹ Supyan, Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi ,*wawancara*, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember , 17 Agustus 2015

efisiensi dan efektivitas kegiatan LKMM, baik dalam aspek kelembagaan, yaitu antara lain meningkatkan pendidikan dan pelatihan, maupun dalam aspek usaha, antara lain memperkokoh jaringan usaha LKMM, meningkatkan keterkaitan usaha, mempercepat proses alih teknologi, meningkatkan kepastian usaha, serta memperluas pemasaran hasil produksi LKMM”.⁶⁰

Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan agar jaringan usaha LKMM lebih luas, antara lain di bidang konsumsi, produksi, pengolahan, pemasaran, dan permodalan.
- 2) mengenali potensi usaha LKMM dan badan usaha lainnya, yang didukung oleh penyediaan informasi usaha dan upaya promosi untuk mendorong terjalinnya hubungan kemitraan usaha dalam berbagai bentuk/pola, yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menunjang dan saling menguntungkan.

e. Program Pemantapan Kelembagaan LKMM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi LKMM agar LKMM mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra LKMM menjadi semakin baik. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi LKMM, akan tertata dan berfungsi dengan baik. infrastruktur pendukung

⁶⁰Supyan, Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, wawancara, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, (17 Agustus 2015)

pengembangan LKMM semakin lengkap dan berkualitas. lembaga gerakan LKMM semakin berfungsi efektif dan mandiri. serta praktik ber-LKMM yang baik (*best practice*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan yang kurang kondusif bagi LKMM.
- 2) Pengarahan per-LKMM-an kepada masyarakat luas disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh LKMM sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi usaha.
- 3) Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum LKMM yang selama ini belum ada.
- 4) Pemberian dukungan untuk membantu penguatan dan kemandirian gerakan LKMM.
- 5) Pemberian arahan dan kemudahan kepada gerakan LKMM untuk melakukan penataan dan penguatan organisasi untuk meningkatkan pelayanan anggota.
- 6) Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan LKMM di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi, dan pemasaran.

- 7) Pengembangan sisten pendidikan, pelatihan dan penyuluhan per-LKMM-an bagi anggota dan pengelola LKMM, calon anggota dan kader LKMM, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip LKMM dalam kehidupan, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan LKMM.
- 8) Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar-LKMM.
- 9) Peningkatan kemampuan aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan, dan program pembangunan LKMM.
- 10) Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan LKMM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.
- 11) mengembangkan sistem akuntansi LKMM untuk memperkuat kelembagaan LKMM seiring dengan makin luasnya usaha LKMM sehingga manajemen LKMM lebih transparan dan dapat diaudit.

f. Program Pengembangan Informasi Per-LKMM-an

Program ini bertujuan pengarahannya penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan LKMM, berupa jaringan informasi kelembagaan dan usaha yang antara lain, meliputi informasi tentang produk-produk yang dihasilkan oleh seluruh LKMM

yang ada di tingkat dusun, desa, kecamatan, maupun kabupaten sehingga, informasi pemasaran tingkat kabupaten atau di tingkat lebih atas dapat diperoleh dengan mudah dengan penyediaan semacam portal LKMM. Hal ini akan mempermudah akses bagi LKMM untuk mengetahui pasar yang kosong terhadap produk yang dihasilkannya.

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda di Bidang LKMM

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kepeloporan generasi muda dalam pembangunan LKMM, serta pewarisan nilai, semangat, dan jiwa LKMM pada generasi penerus. LKMM bukan monopoli orang dewasa, sehingga para pemuda pun harus dibina sedini mungkin sehingga ada penerus di kemudian hari yang telah siap dengan kesadaran sendiri. Artinya mereka telah siap terjun dibanding dengan mereka yang tidak dibina sedini mungkin.

h. Program Peranan Wanita di Bidang LKMM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita dalam pengembangan LKMM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemberian kesempatan yang luas kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan LKMM. Wanita pun perlu didorong untuk juga berkarya, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat dari keluarga dengan cara melakukan kegiatan produktif di LKMM.

Jadi, pengarahan sangat penting bagi bagi sebuah lembaga atau kelompok masyarakat agar mereka dapat berjalan dengan baik dengan tujuan dari awal. Pada Dinas Koperasi ini pengarahan dilakukan dengan program dan pengarahan secara langsung. Jika pengarahan dilakukan dengan program, maka hal tersebut akan lebih efektif untuk menunjang kinerja para LKMM dan kelompok- kelompok masyarakatnya.

Menurut peneliti pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sudah bagus, namun lebih bagus jika Dinas Koperasi selalu setiap periode memberikan pengarahan kepada pihak LKMM.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi memberikan dana, dimana dana tersebut dinamakan dana hibah, dana hibah tersebut disalurkan kepada kelompok masyarakat atau LKMM dan tidak meminta imbalan terhadap dana yang sudah diberikan. Namun pada saat dana hibah tersebut berada pada LKMM, dana hibah tersebut beralih fungsi menjadi simpan pinjam, hal ini dimaksudkan karena LKMM ingin mengembangkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah agar bisa berwirausaha dan mendapatkan penghasilan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah Jember. Dalam hukum Islam hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Adapun landasan hibah yaitu Al Quran surat An Nisa':4 dan QS. Al-Baqarah: 177⁶¹

⁶¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 242

kemudian diinterpretasikan guna memperoleh kejelasan dari fokus masalah yang ada.

Diketahui sebelumnya bahwa LKMM sebagai lembaga yang sangat urgen dalam pengembangan ekonomi di tingkat mikro sudah selayaknya dikembangkan secara signifikan. Pada saat ini di Kabupaten Jember jumlah LKMM sudah mencapai 513 LKMM. Pencapaian jumlah itu tidak terlepas dari peranan pemerintah Kabupaten Jember Khususnya Dinas Koperasi UMKM.

Dinas Koperasi UMKM dalam hal ini mempunyai peran Dinas yang membidangi pengembangan ekonomi mikro dan mempunyai empat peran penting dalam pengembangan LKMM yakni peran permodalan, pengawasan, motivasi dan pengarahan.

1. Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat memiliki empat peran penting, yaitu dalam Permodalan, Pengawasan, Motivasi, dan Pengarahan. Setelah peneliti telaah dapat disimpulkan bahwa empat peran tersebut sudah konsisten diterapkan oleh Dinas Koperasi UMKM kepada LKMM. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil interview oleh peneliti kepada LKMM secara langsung. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember mempunyai peran yang signifikan terhadap LKMM, dan membantu Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat dalam berwirausaha

sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kecil dan menjadi motivator untuk Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat jika suatu saat terjadi permasalahan.

2. Peran Dinas Koperasi UMKM dalam Permodalan LKMM

Dalam peran permodalan LKMM, Dinas Koperasi UMKM hanya sebagai distributor, penyeleksi dan pendata LKMM yang akan menerima dana hibah dari Pemda. Dinas Koperasi UMKM adalah penyalur dana hibah Pemda yang diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi mikro masyarakat. LKMM yang telah dibentuk dan diresmikan oleh Dinas Koperasi UMKM secara otomatis akan menerima dana hibah tersebut.

Selain sebagai penyalur dana hibah tersebut, Dinas Koperasi UMKM juga bertanggung jawab pada dana tersebut. Sehingga Dinas Koperasi UMKM harus tetrap mengawasi dan membimbing agar dana tersebut bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yaitu mengembangkan ekonomi mikro masyarakat.

Sedangkan banyaknya dana yang akan disalurkan oleh Dinas Koperasi UMKM jumlahnya tergantung pada anggaran dana hibah Pemda propinsi Jawa Timur.

Jadi, Dinas Koperasi UMKM hanya menyalurkan dana saja kepada LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat) untuk selanjutnya dana yang telah disalurkan tersebut oleh LKMM dikembangkan kepada kelompok masyarakat RTM (Rumah Tangga Miskin), adapun pemberdayaannya melalui simpan pinjam. LKMM tersebut berdiri sendiri

tidak ada sangkut pautnya dengan Dinas Koperasi, hanya saja Dinas Koperasi yang memotivasi, mengawasi dan memberikan pelatihan kepada LKMM. Dalam Islam maka posisi Dinas Koperasi tersebut diperbolehkan, karena Dinas koperasi sendiri tidak melakukan dana hibah yang digunakan simpan pinjam tersebut. Menurut peneliti yang tidak sesuai adalah LKMM karena dalam Islam dana hibah tidak boleh dipinjamkan, jika dipinjamkan maka itu bukanlah hibah namun hutang atau pinjaman. Dan terlebih lagi dalam simpan pinjam tersebut dalam pengembaliannya dikenakan selama 10 minggu yaitu 5%. Dalam Islam hal ini dapat dikategorikan riba, karena ada kelebihan dalam pengembaliannya, meskipun itu nantinya sebagai bagi hasil namun jika pada awalnya tidak diterapkan akadnya apalagi belum jelas akadnya maka tergolong gharar.

3. Peran Dinas Koperasi UMKM dalam pengawasan LKMM

Dalam melaksanakan peran pengawasan, dari data yang didapatkan Dinas Koperasi UMKM memakai dua macam jenis pengawasan yakni pengawasan pendahuluan dan pengawasan umpan balik.

Pengawasan pendahuluan yang dilakukan adalah menganalisa masalah yang akan terjadi. Pengawasan seperti ini dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dalam rangka mengamati tantangan, kekuatan, kesempatan dan kelemahan LKMM.

Sedangkan pengawasan umpan balik dilaksanakan dalam rangka memberikan control pada LKMM agar tidak melenceng pada tujuan yang

telah ditetapkan. Selain itu jenis pengawasan ini juga dilakukan untuk mencari solusi pada masalah yang terjadi pada perjalanan LKMM.

Adapun cara pelaksanaan pengawasannya, Peran Dinas Koperasi UMKM mempunyai dua cara juga. Hal tersebut adalah pengawasan dengan cara menganalisa laporan keuangan dari beberapa semua LKMM dan mengawasi langsung dengan cara melakukan kunjungan ke beberapa LKMM. Hal ini sangat membantu para LKMM jika ada kesulitan dalam operasionalnya.

4. Peran Dinas Koperasi UMKM dalam memotivasi LKMM

Pelaksanaan perannya sebagai penyemangat perkembangan LKMM dari data yang kami paparkan sebelumnya. Dinas Koperasi UMKM memakai teori motivasi Abraham Maslow.

Abraham Maslow mengemukakan teori motivasi "*Hierarki Kebutuhan*" yang diantaranya terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.

Dinas Koperasi UMKM menerapkan teori tersebut pada kegiatan-kegiatan yang wujudnya motivasi seperti refleksi kemiskinan. Beberapa masyarakat yang menjadi peserta pada kegiatan tersebut diberikan penyadaran akan memahami kemiskinan dan perlunya memenuhi kebutuhan.

Selain itu, teori Hirarki kebutuhan juga diterapkan pada saat memeberikan motivasi pada kalangan perempuan. Pada kegiatan ini kaum

perempuan diberikan motivasi agar mampu menyadari perannya dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya. Selain itu untuk memotivasi para kelompok- kelompok masyarakat Dinas Koperasi juga menggunakan system *Reward* (hadiah). Hal ini sangat baik dilakukan mengingat masyarakat yang masih terbelakang sangat merasa dihargai jika mendapatkan *reward* dan otomatis mereka akan lebih semangat lagi dalam usahanya.

5. Peran Dinas Koperasi UMKM dalam Pengarahan LKMM

LKMM sebagai lembaga keuangan yang beranggotakan masyarakat yang tidak tentu ahli dalam bidang tersebut. tentunya sangat membutuhkan peran pengarahan dari Dinas Koperasi,UMKM dalam permodalan LKMM. Dalam hal ini Dinas Koperasi,UMKM dalam permodalan LKMM telah melaksanakan beberapa program untuk mengarahkan LKMM agar tidak mengalami sesuatu yang kurang diharapkan.

Semua bentuk pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dirasa sudah memenuhi fungsi dari pengarahan itu sendiri. Baik program formal seperti yang berupa agenda maupun yang tidak formal seperti pengarahan yang dilakukan saat bebas saat masyarakat khususnya anggota LKMM datang ke kantor Dinas Koperasi,UMKM'

Agenda-agenda seperti Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan LKMM, Program Peningkatan dan Perluasan Usaha LKMM, dan Program Kerja Sama AntarLKMM dan Kemitraan Usaha, Program

Pemantapan Kelembagaan LKMM Program Pengembangan Informasi Per-LKMM-an selayaknya sudah dianggap mewakili fungsi pengarahan seperti yang disebutkan sebelumnya di pembahasan kajian teori. Fungsi tersebut adalah melakukan orientasi tentang tus yang akan dilakukan dan memberikan petunjuk umum maupun khusus

Sedangkan, fungsi pengarahan yang harus mempengaruhi anggota dan memotivasi baik secara implisit maupun eksplisit bisa dilihat pada agenda seperti Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda di Bidang LKMM dan Program Peranan Wanita di Bidang LKMM.

Peran Dinas Koperasi dalam pengarahan sudah bagus. Dengan menggunakan agenda seperti Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan LKMM, Program Peningkatan dan Perluasan Usaha LKMM, Program Kerja Sama Antar LKMM dan Kemitraan Usaha, Program Pemantapan Kelembagaan LKMM, Program Pengembangan Informasi Per-LKMM-an dan sebagainya sudah bagus diterapkan, hanya saja menurut peneliti agar lebih optimal, hendaknya pengarahan dilakukan setiap periode agar para LKMM dalam pengembangan usahanya semakin maju.

Koperasi dalam islam dikenal dengan sistem bisnis yang menerapkan rasa saling tolong menolong. Koperasi yang merupakan kerja sama modal maupun usaha sangat dianjurkan dalam agama islam. Dalam al-qur`an disebutkan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah, 5:2)⁶²

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember berperan sebagai penyalur modal. Modal tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember dengan status Hibah. Dinas Koperasi menyalurkan modal tersebut kepada LKMM dimana LKMM merupakan upaya dari Pemerintah Daerah agar masyarakat dapat berfikir kritis, untuk keluar dari kemiskinannya. Dalam Islam maka posisi Dinas Koperasi tersebut diperbolehkan, karena Dinas koperasi sendiri tidak menggunakan dana hibah untuk operasionalnya. Dinas Koperasi hanya menyalurkan dana tersebut kepada LKMM. LKMM yang mengembangkan programnya dengan pola simpan pinjam dimana kelompok masyarakat dapat meminjam dana tersebut ke LKMM untuk pengembangan usahanya.

Dalam hukum Islam hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁶³ Adapun landasan hibah yaitu Al Quran surat An Nisa':4 dan QS. Al-Baqarah: 177

⁶² Departemen Agama, *Terjemah Al-qur`an Al-Hikmah*, (Bandung, 2010), 106

⁶³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 242

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisa’: 4)

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ... ﴿١٧٧﴾

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan”. (QS. Al-Baqarah:177)

Menurut peneliti yang tidak sesuai adalah LKMM karena dalam Islam dana hibah tidak boleh di pinjamkan, jika di pinjamkan maka itu bukanlah hibah namun hutang atau pinjaman.

Jika dilihat dari segi ekonomi, maka LKMM juga dapat dibenarkan, karena untuk pengembangan LKMM harusnya juga pokmas (kelompok masyarakat) memberikan dana balik atau bagi hasilnya kepada LKMM, karena dana itu bisa digunakan LKMM untuk lebih mengembangkan usahanya dan membentuk lagi pokmas- pokmas di daerah lain, sehingga perekonomian masyarakat Jember lebih berkembang dan maju. Selain itu jika ada kegiatan yang akan diadakan LKMM seperti pelatihan dan sebagainya LKMM tidak sepenuhnya tergantung kepada dana hibah yang diberikan oleh Dinas Koperasi karena dana hibah tersebut sudah disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) adalah:

1. Kesimpulan Umum

Dinas Koperasi dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat memiliki empat peran penting yaitu mengenai permodalan, pengawasan, motivasi dan pengarahan.

2. Kesimpulan Khusus

a. Peran permodalan

Dinas koperasi UMKM berperan sebagai distributor modal yang berasal dari dana hibah Pemda. Selain itu juga bertugas menjaga dan mengawasi modal tersebut.

b. Peran pengawasan

Dalam melakukan pengawasannya Dinas Koperasi UMKM memakai analisa SWOT untuk mengamati peluang, kelemahan dan potensi LKMM. Selain itu pengawasan dilakukan dengan mengamati laporan-laporan keuangan dan mengamati langsung proses kerja setiap LKMM.

c. Peran Motivasi

Motivasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi menggunakan teori Abraham Maslow yaitu itu *Hierarki Kebutuhan*. Peranan motivasi dilakukan dengan seminar dan sejenisnya dan menggunakan *Reward* (hadiah).

d. Peran pengarahan

Peran Dinas Koperasi dalam pengarahan yaitu dengan menerapkan agenda seperti Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan, Program Pembinaan, Program Pengembangan Lembaga.

B. Saran

1. Bagi Dinas Koperasi UMKM, hendaknya dalam memberikan pengarahan tidak hanya menunggu LKMM sampai mengalami masalah, namun juga harus setiap periode atau secara berkala mengunjungi LKMM untuk memberikan pengarahan dan motivasi agar masyarakat dapat menanggulangi dengan cepat jika suatu saat akan ada permasalahan.
2. Bagi LKMM, hendaknya kelompok masyarakat lebih memahami tentang dana hibah agar dana hibah bisa dipakai selaras dengan tujuannya, juga lebih memahami akad yang digunakan, agar terhindar dari riba.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, jika dapat dimungkinkan untuk membentuk Dinas Koperasi yang berbasis syariah atau programnya yang berlandaskan syariah agar terhindar dari unsur gharar ataupun riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Asy-Syarbasyi Ahmad. 1987. *Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islam*. Beirut: Dar Alamil Kutub, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendikia.
- Bangun, Wilson. 2008. *Intisari Manajemen* Bandung: PT Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadakencana
- Daft Ricard L. 2003. *Menejemen*. Jakarta: Salemba Empa.
- Departemen Agama. 2010. *Terjemah Al-qur'an Al-Hikmah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Fathorrozi. 2010. *Ekonomi Koperasi*. Jember: Jember University Press
- Huberman . B. Miles. 1988. *Kualitatif Data Analisis*. California: Sage Publication
- J Mockler Robert. 1970. *Reading in Management Control*. New York: Apleton-Century-croft.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Isma'il. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah, Dalam Pusaran Perkembangan Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Rachmat, Syafe'i. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidyatul Mujtahi (Terjemah)*. Semarang: Asyifa
- STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press
- Subandi. 2011. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiono. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. 2009. *Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerja*. Lampung: Fakta Press IAIN Raden Intan.
- Tanzen, Ahmad. 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Taqdir, Meaty Qodratilah. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.

Wijayanto, Dian, 2012 *Pengantar Menejemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Menejemen*. Yogyakarta:Graha Ilmu,

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha ilmu.

_____. 2000. *Dasar dan Contoh AD-ART BMT* . Jakarta: PINBUK

Data Badan Pusat Statistik (BPS) . 2014.

Dinas Koperasai,UMKM Kabupaten Jember, 2013,*Evaluasi Kinerja Lembaga Keuanagn Masyarakat (LKMM)*.

Dinas Koperasi,UMKM, 2014, *Data Primee Perkembangan LKMM*, Jember,

<http://www.Developmentcountry.blogspot.com/2009/12/definisi-pengembangan.html?m=1>

<http://www.oaththinking.blogspot.com/2011/02/tujuan-pengawasan.html?m=1>

<http://ilm4a7eng.wordprss.com/2012/04/25/fungsi-pengarahan-dalam-manajemen/>



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	POKOK MASALAH
PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT (LKMM) DI KABUPATEN JEMBER	Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Di Kabupaten Jember	1. Permodalan 2. Pengawasan 3. Motivasi 4. Pengarahan	1. Modal Sendiri 2. Modal Pinjaman 1. Pengawasan Pendahuluan 2. Pengawasan <i>Concurrent</i> 3. Pengawasan umpan balik 1. Hierarki Kebutuhan 2. Pemuasan Kebutuhan 3. Proses Kebutuhan 1. Komunikasi 2. Laporan	1. Informan a. Kepala Bidang UMKM b. Kasi Usaha Mikro c. Kasi Pengawasan 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Metode penelitian: Deskriptif 3. Metode pengumpulan data : a. Observasi b. Interview c. Studi Dokumentasi 4. Metode Analisa data : Miles & Huberman (Triangulasi Sumber)	PokokMasalah : Bagaimana Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Di Kabupaten Jember? Sub PokokMasalah : 1. Bagaimana peran dinas Koperasi usaha mikro kecil dan Menengah dalam membantu permodalan untuk pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakatdi kabupaten Jember? 2. Bagaimana Peran Dinas koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengawasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember? 3. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memotivasi Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember? 4. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengarahkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Kabupaten Jember?